



**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020**

**Disusun :
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pada intinya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2020, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat bagi seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Demikian, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sidoarjo, 26 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. ACHMAD ZAINI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640131 199103 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	x
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
a) Dasar Hukum.....	1
b) Tujuan Penyusunan.....	1
1.2 Gambaran Umum	1
a) Struktur Organisasi	1
b) Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.3 Aspek Strategis OPD	4
a) Sumber Daya Aparatur	4
b) Aset Yang Dimiliki.....	7
c) Isu Strategis Yang Dihadapi	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis.....	9
2.1.1 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD.....	9
2.1.2 Matrik Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	17
2.3 Perjanjian Kinerja.....	29
2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala OPD	29
2.3.2 Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Eselon III	30
2.3.3 Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas / Eselon IV.....	34
2.3.4 Anggaran Per Program / Kegiatan	41
BAB III : AKUNTABILITAS KERJA	45
3.1 Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD.....	45
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	45
a) Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	45
b) Pengukuran Kinerja Tahunan.....	46

c) Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan.....	51
1. Implementasi Produk Hukum Daerah.....	51
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target implementasi produk hukum daerah.....	51
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi produk hukum daerah	52
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi produk hukum daerah	53
2. Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan.....	54
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan bidang pemerintahan	54
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan.....	55
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan.....	56
3. Implementasi Kebijakan Daerah Dibidang Kesejahteraan Rakyat... ..	57
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	57
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	57
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat... ..	58
4. Implementasi Kebijakan Daerah Di Bidang Perekonomian.....	58
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	58
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	61
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	61
5. Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan.....	63
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi Kebijakan daerah Bidang Pembangunan.....	63
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan.....	64

iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan.....	65
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan.....	66
6.	Implementasi Kebijakan Daerah Di Bidang PBJ.....	67
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang PBJ.....	67
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang PBJ.....	68
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi kebijakan daerah Bidang PBJ.....	68
7.	Implementasi Kebijakan Daerah Di Bidang Organisasi	69
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Organisasi.....	69
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang Organisasi.....	72
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Organisasi.....	73
8.	Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	74
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Denagn Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	74
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	75
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	76
9.	IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target.....	77
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai target.....	77
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target.....	78
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target.....	78
10.	Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	79
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	79
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk	

Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	80
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah.....	81
11. Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah.....	82
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.....	82
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.....	83
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.....	84
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	85
a) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	85
b) Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang	96
3.3 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung.....	99
3.4 Laporan Realisasi Anggaran.....	121
3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	127
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	129
a)Efektivitas dan Efisiensi.....	129
b)Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	130
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 1.2	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat / Golongan	6
Tabel 1.3	Aset Yang Dimiliki.....	7
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra	9
Tabel 2.2	Matrik Rencana Strategis	10
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala OPD.....	29
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Eselon III.....	30
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas / Eselon IV	34
Tabel 2.7	Anggaran Per Program / Kegiatan.....	41
Tabel 3.1	Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD.....	45
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	45
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahunan	46
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Hukum.....	47
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Pemerintahan	47
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	47
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Perekonomian	48
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Pembangunan.....	48
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Tahunan Pengadaan Barang Jasa	49
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Organisasi	49
Tabel 3.11	IKU OPD yang mencapai target.....	49
Tabel 3.12	Nilai SKM dengan Kategori Baik	50
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Umum.....	50
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Protokol dan Rumah Tangga.....	51
Tabel 3.15	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Hukum.....	51
Tabel 3.16	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Hukum	52
Tabel 3.17	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Hukum.....	53

Tabel 3.18 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pemerintahan.....	54
Tabel 3.19 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Pemerintahan	55
Tabel 3.20 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Pemerintahan.....	56
Tabel 3.21 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Kesejahteraan Rakyat	57
Tabel 3.22 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Kesejahteraan Rakyat	57
Tabel 3.23 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	58
Tabel 3.24 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Perekonomian	59
Tabel 3.25 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Perekonomian	61
Tabel 3.26 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Perekonomian.....	62
Tabel 3.27 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pembangunan	63
Tabel 3.28 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bagian Pembangunan.....	64
Tabel 3.29 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bagian Pembangunan	65
Tabel 3.30 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis Bidang Pembangunan.....	66
Tabel 3.31 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang PBJ.....	67
Tabel 3.32 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang PBJ.....	68
Tabel 3.33 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang PBJ .	68
Tabel 3.34 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Organisasi	69
Tabel 3.35 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Organisasi	72

Tabel 3.36 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Organisasi	73
Tabel 3.37 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	74
Tabel 3.38 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	75
Tabel 3.39 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	76
Tabel 3.40 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai Target.....	77
Tabel 3.41 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target.....	78
Tabel 3.42 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target	79
Tabel 3.43 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	79
Tabel 3.44 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	80
Tabel 3.45 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	81
Tabel 3.46 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.....	82
Tabel 3.47 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	83
Tabel 3.48 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	84
Tabel 3.49 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan sasaran	86
Tabel 3.50 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Hukum.....	101

Tabel 3.51 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Pemerintahan.....	103
Tabel 3.52 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	105
Tabel 3.53 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Perekonomian.....	108
Tabel 3.54 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Pembangunan	110
Tabel 3.55 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian PBJ	113
Tabel 3.56 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Organisasi.....	115
Tabel 3.57 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Umum.....	119
Tabel 3.58 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Protokol & Rumah Tangga.....	120
Tabel 3.59 Laporan Realisasi Anggaran.....	127
Tabel 3.60 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	129
Tabel 3.61 Efektifitas dan Efisiensi.....	130

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Hukum.....	51
Grafik 3.2 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Hukum	52
Grafik 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Hukum	53
Grafik 3.4 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Pemerintahan	55
Grafik 3.5 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Pemerintahan.....	56
Grafik 3.6 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Kesejahteraan Rakyat	57
Grafik 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Kesejahteraan Rakyat	58
Grafik 3.8 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Perekonomian.....	59
Grafik 3.9 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Perekonomian	61
Grafik 3.10 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Perekonomian.....	62
Grafik 3.11 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pembangunan	63
Grafik 3.12 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bagian Pembangunan.....	64
Grafik 3.13 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bagian Pembangunan	65
Grafik 3.14 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis Bidang Pembangunan.....	66
Grafik 3.15 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang PBJ	67
Grafik 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang PBJ	68
Grafik 3.17 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang PBJ .	69
Grafik 3.18 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Organisasi.....	70
Grafik 3.19 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Organisasi	72

Grafik 3.20 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Organisasi	73
Grafik 3.21 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	74
Grafik 3.22 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	75
Grafik 3.23 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik.....	76
Grafik 3.24 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai Target.....	77
Grafik 3.25 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target	78
Grafik 3.26 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target	79
Grafik 3.27 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	80
Grafik 3.28 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	81
Grafik 3.29 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah.....	82
Grafik 3.30 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	83
Grafik 3.31 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	84
Grafik 3.32 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	85

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	<p>a. Persentase implementasi produk hukum daerah</p> <p>b. Persentase implementasi Kebijakan Daerah untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pemerintahan • Bidang Kesejahteraan Rakyat • Bidang Perekonomian • Bidang Pembangunan • Bidang Pengadaan Barang / Jasa • Bidang Organisasi <p>c. Persentase IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target</p> <p>d. Persentase OPD Pelayanan Publik dengan Nilai SKM minimal Kategori Baik</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>63,64%</p> <p>100%</p>	<p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Berhasil</p> <p>Kurang</p> <p>Berhasil</p>

		e. Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	115,97%	Sangat Berhasil
		f. Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	113,3%	Sangat Berhasil

KETERANGAN :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

➤ Sasaran 1 :

Didukung oleh 9 Program, dengan 15 Indikator Kinerja Program, dan 42 Kegiatan, dengan 74 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Capaian %	Kategori
1.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase Kajian dan dokumentasi hukum yang dilaksanakan	100%	Berhasil
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	Berhasil
		Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%	Berhasil
a.	1. Perencanaan dan pembahasan	Jumlah rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	100%	Berhasil

		produk hukum daerah	Jumlah rancangan peraturan Bupati yang difasilitasi	100%	Berhasil
			Jumlah rancangan keputusan bupati yang difasilitasi	100%	Berhasil
b.		2. Penyusunan jawaban eksekutif	Persentase jawaban eksekutif yang difasilitasi	100%	Berhasil
c.		3. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Persentase permintaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100%	Berhasil
			Persentase penyuluhan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	Berhasil
d.		4. Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Persentase hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
			Persentase dokumentasi secara manual dan digital	100%	Berhasil
2.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	Berhasil
a.		1. Fasilitasi kerjasama	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
b.		2. Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupa bumi unsur buatan	100%	Berhasil

		3. Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah Pilar Batas Daerah	100%	Berhasil
c.			Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah	100%	Berhasil
d.		4. Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%	Berhasil
		5. Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintahan umum	100%	Berhasil
e.			Jumlah laporan monev standart pelayanan minimal	100%	Berhasil
3.	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	Berhasil
a.		1. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun (merekomendasikan hafidh hafidhoh, memberikan bantuan, penghargaan, hasil dialog, seleksi tokoh agama)	100%	Berhasil

			Persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi	100%	Berhasil
b.		2. Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	Persentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi yang tertib dan tepat waktu pelaporan keuangan	100%	Berhasil
			Persentase hasil binaan peserta MTQ yang berprestasi	100%	Berhasil
c.		3. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	100%	Berhasil
			Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	100%	Berhasil
4.	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD		Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	Berhasil
a.		1. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	100%	Berhasil
b.		2. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti.	100%	Berhasil

c.	3. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	100%	Berhasil
d.	4. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil monev bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
e.	5. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita cukai yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100%	Berhasil
f.	6. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang dilakukan	100%	Berhasil

g.		7. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, penanaman modal dan BUMD yang disusun	100%	Berhasil
h.		8. Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal Bersama dg Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yg diinialisasi oleh Pemda	Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100%	Berhasil
5.	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	100%	Berhasil	
		Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%	Berhasil	
		Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%	Berhasil	

			Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	100%	Berhasil
a.		1.Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	Jumlah kebijakan penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang dihasilkan	100%	Berhasil
			Sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	100%	Berhasil
			Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional Development System)	100%	Berhasil
b.		2. Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi <90 %	100%	Berhasil
c.		3. Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun	100%	Berhasil
d.		4. Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100%	Berhasil
6.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa		Level Kematangan Organisasi PBJ	100%	Berhasil

a.		1. Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	Prosentase ketersediaan layanan LPSE secara online	100%	Berhasil
b.		2. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	163,69%	Sangat Berhasil
			Persentase penawaran penyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	107,14%	Sangat Berhasil
c.		3. Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100%	Berhasil
d.		4. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase OPD dengan pemaketan PBJ yang sesuai	106,48%	Sangat Berhasil
7.	Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik		Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaanya ditindaklanjuti	100%	Berhasil
			Persentase perangkat daerah/unit kerja yang SKM nya berkategori baik	100%	Berhasil
a.		1. Monev Kelembagaan, Anjab, dan	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	100%	Berhasil

		Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang ditindaklanjuti hasil monev ANJAB dan ABK nya	100%	Berhasil
b.		2. Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100%	Berhasil
			Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP	100%	Berhasil
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja	100%	Berhasil
c.		3. Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase pegawai sekretariat daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	80,64%	Cukup
			Persentase disiplin pegawai sekretariat daerah	91,36%	Berhasil
			Hasil Perjanjian Kinerja Individu dengan nilai diatas 90 %	89,71%	Cukup
8.	Program Pelayanan Kesekretariatan		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	Berhasil

a.	1. Penyediaan Barang / Jasa Perkantoran	Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar	100%	Berhasil
		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	100%	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	100%	Berhasil
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas Pajaknya	100%	Berhasil
		Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	100%	Berhasil
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran	100%	Berhasil
		Jumlah jam lembur yang terbayar	100%	Berhasil
b.		2. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	100%
	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun		100%	Berhasil
c.	3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Tersusunya laporan barang milik daerah	100%	Berhasil

d.	4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	100%	Berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	100%	Berhasil
e.	5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	100%	Berhasil
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	Berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	100%	Berhasil
f.	6. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	100%	Berhasil
g.	7. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	100%	Berhasil
i.	8. Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil

9.	Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.		Tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga	100%	Berhasil
a.		1. Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap kegiatan yang difasilitasi Protokoler	100%	Berhasil
b.		2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga daerah yang di penuhi	100%	Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a) Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Lakporan Kinerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

b) Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

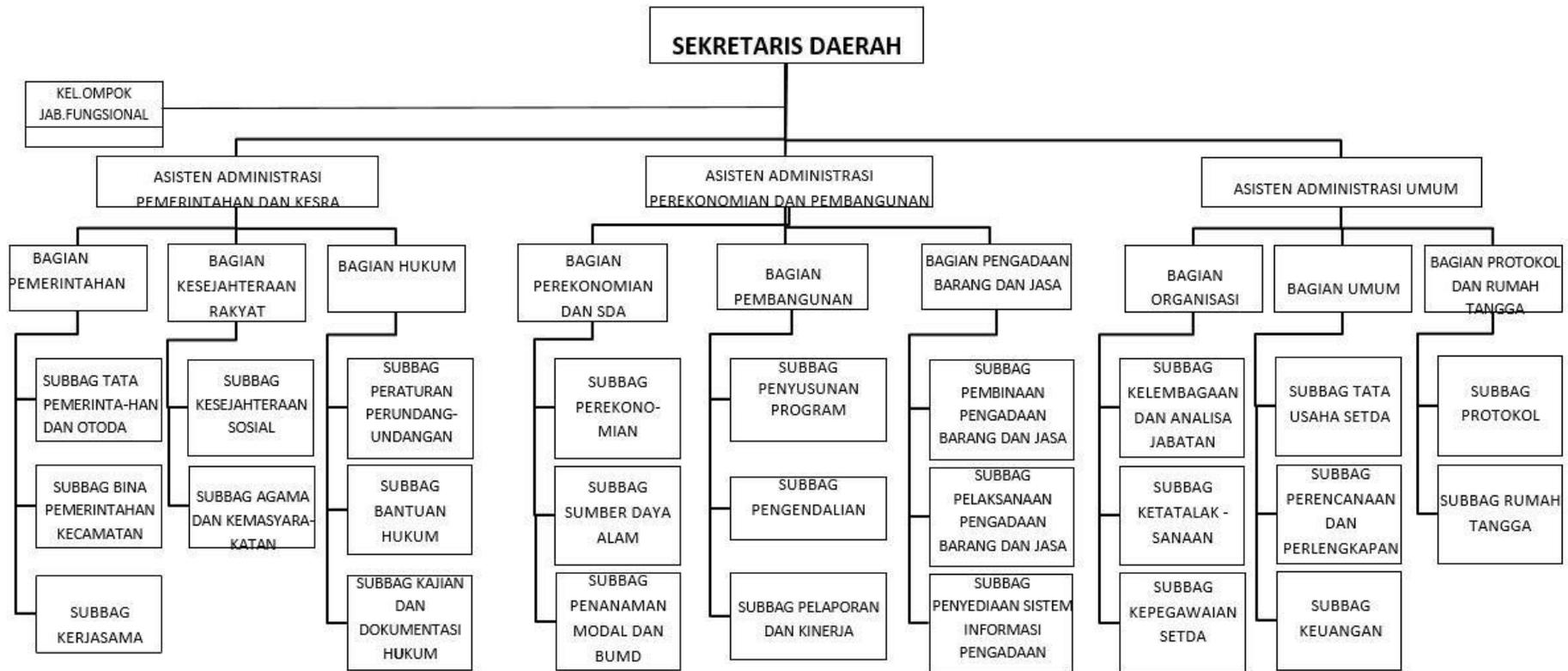
1.2 Gambaran Umum OPD

a) Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten yang membawahi beberapa bagian :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3. Asisten Administrasi Administrasi Umum, terdiri dari
 - a. Bagian Organisasi
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Protokol dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan program perangkat daerah dan menyusun program Sekretariat Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, Asisten dan Bagian;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, Asisten dan Bagian;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh :

1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan,

3. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyiapkan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi di bidang organisasi, umum, protokol, serta umum.

1.3 Aspek Strategis OPD

Meliputi :

a) **Sumber Daya Aparatur**

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN									JUML
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	
1	SEKRETARIS DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	STAF AHLI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
3	ASISTEN SETDA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	2	0	0	0	7	3	0	12
5	BAGIAN KESRA	0	0	1	0	0	0	4	2	0	7
6	BAGIAN HUKUM	0	0	1	0	0	0	11	2	0	14
7	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA	0	0	3	0	0	0	4	1	0	8
8	BAGIAN PEMBANGUNAN	0	0	2	0	0	1	5	3	0	11
9	BAGIAN PBJ	0	0	5	0	0	6	16	3	1	31
10	BAGIAN ORGANISASI	0	0	3	0	0	1	5	3	0	12
11	BAGIAN UMUM	0	0	10	0	0	1	13	3	0	27
12	BAGIAN PROTOKOL & RT	0	4	14	0	0	2	8	2	0	30
TOTAL KESELURUHAN		0	4	41	0	0	11	74	27	1	158

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020
BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

NO	UNIT KERJA	PANGKAT / GOLONGAN RUANG																JUML
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	SEKRETARIS DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	STAF AHLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	ASISTEN SETDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	BAGIAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	0	1	0	0	12
5	BAGIAN KESRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	7
6	BAGIAN HUKUM	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	3	0	1	0	0	14
7	BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	8
8	BAGIAN PEMBANGUNAN	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	2	1	0	0	0	11
9	BAGIAN PBJ	0	0	0	0	0	0	5	9	9	1	5	1	1	0	0	0	31
10	BAGIAN ORGANISASI	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	3	1	0	0	0	12
11	BAGIAN UMUM	0	0	0	0	0	2	1	7	2	4	6	4	0	1	0	0	27
12	BAGIAN PROTOKOL & RT	0	0	2	0	2	4	4	3	7	4	2	1	0	1	0	0	30
TOTAL KESELURUHAN		0	0	2	0	2	7	16	20	24	25	26	22	3	5	5	1	158

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat / Golongan

b) Aset Yang Dimiliki

Jumlah aset yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah meliputi :

NO	JENIS KIB	JUMLAH ASET (Rp)	KETERANGAN
1.	KIB A (Tanah)	54.852.000.000,00	Meliputi tanah pendopo, tanah setda, tanah villa tretes, rumah tamu, rumah dinas
2.	KIB B (Peralatan dan mesin)	41.377.155.497,36	Meliputi alat besar, alat angkut, alat bengkel dan ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran dan kesehatan, komputer, peralatan olahraga
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	22.680.079.816,00	Meliputi gedung kantor Setda, pendopo, rumah tamu, rumah dinas, jalur difabel, villa tretes, pilar batas desa / kecamatan / daerah, tugu peringatan
4.	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	1.169.381.030,00	Meliputi jaringan instalasi air, listrik, telepon
5.	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	128.999.850,00	Meliputi bahan perpustakaan, bahan bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga
	TOTAL	120.207.616.193,36	

Tabel 1.3 Aset Yang Dimiliki

c) Isu Strategis Yang Dihadapi

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah antara lain yaitu:

1. Monitoring atas rencana aksi belum diimplementasikan sehingga update performance tidak dapat diketahui dengan pasti sebagai bahan pimpinan untuk memberikan rekomendasi atau alternative solusi atas kendala yang terjadi sekaligus tidak dapat dijadikan referensi dalam rangka pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
2. Indikator kinerja individu (IKI) yang mengacu pada IKU OPD belum dilengkapi dengan penjelasan atas uraian aktifitasnya

masing-masing serta belum sepenuhnya mendapat tandatangan dari atasan langsungnya sebagai bentuk persetujuan dan komunikasi kedua pihak baik atasan maupun bawahan.

3. Informasi pembandingan lain dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja instansi juga belum disajikan yaitu Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah renstra, perbandingan dengan capaian kinerja target nasional atau RPJMN dan Instansi lain yang sejenis.
4. Belum ada kesinambungan antara rekomendasi triwulan sebelumnya dengan progress capaian atas hambatan/permasalahan pada tiap-tiap tingkatan dalam bentuk langkah-langka nyata di triwulan berikutnya .
5. Adanya Perubahan Indikator Kinerja sasaran tahun 2017 dan 2018 sehingga beberapa indikator tidak dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja lebih baik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah memiliki keterkaitan dengan RPJMD

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.1. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra

Sekretariat Daerah

2.1.2 Matriks Rencana Strategis

SASARAN STRATEGIS		DEFINISI OPERASIONAL	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR			2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi produk hukum daerah	DO: Produk hukum adalah semua (akumulasi) produk hukum yang dihasilkan di 1 tahun sebelumnya (Perbup dan Perda); FORMULASI: Jumlah implementasi Produk hukum daerah / Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan 1 tahun sebelumnya x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum		Kepala Bagian Hukum
										1. Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	Kasubag Peraturan Perundang - Undangan
										2. Penyusunan jawaban eksekutif	
										3. Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Kasubbag Kajian dan Dokumentasi Hukum
										4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Kasubbag Bantuan Hukum
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Pemerintahan		DO : kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi; FORMULASI : (Jumlah implementasi kebijakan daerah bidang Pemerintahan/ Jumlah kebijakan daerah bidang Pemerintahan) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Kepala bagian Pemerintahan
										1. Fasilitasi kerjasama	Kasubbag Kerjasama
										2. Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
										3. Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	

									4. Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	
									5. Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan
Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Kesra	DO : kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi; (Jumlah implementasi kebijakan daerah bidang Kesra/ Jumlah kebijakan daerah bidang Kesra) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
									1. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	Kasubbag Kesejahteraan Sosial
									2. Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	
									3. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	Kasubbag Agama dan Kemasyaraktan
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Perekonomian	DO : kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi; FORMULASI : (Jumlah implementasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian,		Kepala Bagian Perekonomian
									1. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan	Kasubbag Perekonomian

		kebijakan daerah bidang Perekonomian/ Jumlah kebijakan daerah bidang Perekonomian) x 100%						SDA, Penanaman Modal dan BUMD	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 2. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan 3. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran 4. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan	Kasubbag Sumber Daya Alam
--	--	---	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	---------------------------

									perundang-undangan di bidang cukai	
									5. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan	
									6. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan	
									7. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Kasubag Penanaman Modal dan BUMD
									8. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Pembangunan	DO : kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi; FORMULASI : (Jumlah implementasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan		Kepala Bagian Pembangunan
									1.Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan	Kasubbag Penyusunan Program

	kebijakan daerah bidang Pembangunan/ Jumlah kebijakan daerah bidang Pembangunan) x 100%							Pelaporan Pembangunan	kegiatan pembangunan daerah.	
									2. Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	Kasubbag Pengendalian
									3. Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Kasubbag Pelaporan dan Kinerja
									4. Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa	DO : Capaian kinerja perangkat daerah (sesuai dengan Perjanjian Kinerja) terhadap seluruh jumlah indikator kinerja utama perangkat daerah Formulasi : (Jumlah IKU OPD yang mencapai target / Jumlah IKU yang diukur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa		Kepala Pengadaan Barang dan Jasa
									1. Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
									2. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa
									3. Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
									4. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi	DO : kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi; FORMULASI :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah		Kepala Bagian Organisasi
									1. Monev Kelembagaan, Anjab, dan	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab

	(Jumlah implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi/ Jumlah kebijakan daerah bidang Organisasi) x 100%							dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	
									2. Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Kasubbag Kepegawaian Setda
Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	DO : NILAI SKM minimal Baik Formula : Jumlah OPD dengan Nilai SKM Kategori minimal Baik / Jumlah OPD x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3. Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	Kasubbag Ketatalaksanaan
Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	DO:Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah Formulasi : Hasil Penilaian SKM Sekretariat Daerah							Program Pelayanan Kesekretariatan		Kepala Bagian Umum
									1. Penyediaan Barang / Jasa Perkantoran	Kasubbag Keuangan
									2. Penyusunan Laporan Keuangan	
									3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Kasubbag Perencanaan dan Perlengkapan
									4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	
									5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	
									6. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	
7. Monitoring dan evaluasi										

									pelaporan kinerja PD	
									8. Penyediaan barang/ Jasa Perkantoran	Kasubag Tata Usaha
									9. Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	
									10. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	
Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	DO:Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah Formulasi : Hasil Penilaian SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah				75	75	75	Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.		Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga
									1. Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Kasubbag Protokol
									2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Kasubbag Rumah Tangga

Tabel 2.2 Matriks Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja Tahunan

SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		Target 2020	ANGGARAN	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase Kajian dan dokumentasi hukum yang dilaksanakan	100%	1. Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	5 Perda	395.210.000	
				Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%		Jumlah rancangan peraturan Bupati yang difasilitasi	30 Perbup		
				Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%		Jumlah rancangan keputusan bupati yang difasilitasi	450 SK		
							2. Penyusunan jawaban eksekutif	Persentase jawaban eksekutif yang difasilitasi	100%	11.584.800
							3. Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Persentase hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	250.453.860
						Persentase dokumentasi secara manual dan digital		100%		
							4. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum,	Persentase permintaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100%	469.690.000

					pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Persentase penyuluhan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	
Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan	100%	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	1. Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta Pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintahan umum	1 Dokumen	132.010.965
						Jumlah laporan monev standart pelayanan minimal	1 Dokumen	
					2. Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%	999.438.501
						3. Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupa bumi unsur buatan	2 kecamatan
					4. Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah Pilar Batas Daerah	- Pilar	238.171.500
						Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah	1 Dokumen	

					5. Fasilitas kerjasama	Persentase fasilitas kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	354.052.420
Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Kesra	100%	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	1. Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	Persentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi yang tertib dan tepat waktu pelaporan keuangan	100%	5.625.080.580
						Persentase hasil binaan peserta MTQ yang berprestasi	100%	
					2. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	4 Kebijakan	1.051.139.740
						Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	100%	
					3. Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun (merekomendasikan hafidh hafidhoh, memberikan bantuan, penghargaan, hasil dialog, seleksi tokoh agama)	2 Kebijakan	3.100.381.250
						Persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi	100%	

	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Perekonomian	100%	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	80%	1. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	1 Dokumen	40.073.850
						2. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil monev bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	80%	65.900.000
						3. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan eceran	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, penanaman modal dan BUMD yang disusun	3 Laporan	49.850.000

					4. Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	1 Dokumen 2 Laporan	362.423.240
					5. Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti.	80%	128.400.000
					6. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita cukai yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	100%	0

						7. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang dilakukan	3 Jenis	216.500.000
						8. Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal Bersama dg Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yg diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah	-	-	3.500.000
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Pembangunan	100%	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	85%	1.Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	Jumlah kebijakan penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang dihasilkan	1 Kebijakan		398.949.000

				Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%		Sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	1 Sub Sistem	
				Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%		Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional Development System)	47 OPD	
	Persentase IKU OPD yang mencapai target	100%		Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	100%	2. Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100%	413.252.900
						3. Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi <90 %	100%	143.234.200
						4. Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 Dokumen	313.330.045

Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 3	1. Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	Prosentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80%	890.963.124
					2. Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	85%	455.691.940
						Persentase penawaran penyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	75%	
					3. Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100%	441.327.840
					4. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase OPD dengan pemaketan PBJ yang sesuai	95%	787.202.400
Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi	100%	Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaanya ditindaklanjuti	100%	1. Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100%	591.345.000
				100%		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP	100%	
						Persentase perangkat daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja	95%	

						2. Monev Kelembagaan, Anjab, dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya	100%	148.825.000
							Persentase OPD yang ditindaklanjuti hasil monev ANJAB dan ABK nya	100%	
	Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%				3. Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase pegawai sekretariat daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100%	36.682.080
							Persentase disiplin pegawai sekretariat daerah	100%	
							Hasil Perjanjian Kinerja Individu dengan nilai diatas 90 %	100%	
	Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	75	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	1. Penyediaan Barang / Jasa Perkantoran	Rekening listrik, air, telepon, dan internet yang terbayar	12 Bulan	6.872.106.860
							Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	22.440 buah	
							Jumlah BBM yang disediakan	2 Jenis	
							Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas Pajaknya	30 Unit	
							Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	3 Jenis	

						Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	2 Jenis	
						Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	20 Jenis	
						Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran	42 Orang	
						Jumlah jam lembur yang terbayar	3500 Jam	
					2. Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	757.938.980
					3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Tersusunya laporan barang milik daerah	7 Laporan	6.585.000
					4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	3.588.714.000
						Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	20 Jenis	
					5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	4 Gedung	1.389.510.660

					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	33 Unit	
					Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	15 Jenis	
				6. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	8 Dokumen	24.285.000
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dokumen	
				7. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 Dokumen	727.500
					Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 Laporan	
				8. Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	65 Orang / Bulan	5.792.184
					Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	17 Laporan	

	Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75	Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	Tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga	A	1. Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap kegiatan yang difasilitasi Protokoler	100%	3.884.185.400
						2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga daerah yang di penuhi	100%	6.648.628.480

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja, maka pihak bawahan akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sedangkan pihak atasan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Kepala OPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	1. Persentase implementasi produk daerah hukum	100%
		2. Persentase implementasi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Kesra c. Bidang Perekonomian d. Bidang Pembangunan e. Bidang PBJ f. Bidang Organisasi	100%
		3. Persentase IKU OPD yang mencapai target	100%
		4. Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%
		5. Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah	75
		6. Nilai SKM Pelayanan kepada Pimpinan Daerah	75

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala OPD

2.3.2. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Eselon III

No.	Program	Indikator Program	Target	Penanggung Jawab
1.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase kebijakan daerah bidang Pemerintahan yang diterapkan	100%	Kepala Bagian Pemerintahan
2.	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yang diterapkan	100%	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Persentase Kajian dan dokumentasi hukum yang dilaksanakan	100%	Kepala Bagian Hukum
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	
		Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%	
4.	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	Kepala Bagian Perekonomian
5.	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	85%	Kepala Bagian Pembangunan
		Persentase Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%	

		Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%	
		Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerja telah sesuai dengan dok Perencanaan Diatasnya	100%	
6.	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7.	Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaanya ditindaklanjuti	100%	Kepala Bagian Organisasi
		Persentase perangkat daerah/unit kerja yang SKM nya berkategori baik	100%	
8.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	75	Kepala Bagian Umum
9.	Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	Tingkat Kepuasan Pimpinan Daerah Terhadap Layanan Administrasi Kegiatan, Keprotokolan dan Rumah Tangga	75	Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga

Tabel 2.5 Tabel Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator / Eselon III

2.3.3. Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas / Eselon IV

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Penanggung jawab
1.	Fasilitasi kerjasama	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Kasubbag Kerjasama
2.	Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupa bumi unsur buatan	2 kecamatan	Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3.	Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	Jumlah laporan monev pemasangan pilar batas wilayah	1 Dokumen	
		Jumlah pilar batas daerah	- Pilar	
4.	Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintahan umum	1 Dokumen	
		Jumlah laporan monev standar pelayanan minimal	1 Dokumen	
5.	Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	Persentase kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%	Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan
6.	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun (merekomendasikan hafidh hafidhoh, memberikan bantuan, penghargaan, hasil dialog, seleksi tokoh agama)	2 Kebijakan	Kasubbag Agama dan Kemasyarakatan
		Persentase peserta hasil binaan seleksi MTQ yang berprestasi	100%	

7.	Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	Persentase lembaga yang mendapatkan rekomendasi yang tertib dan tepat waktu pelaporan keuangan	100%	
		Persentase hasil binaan peserta MTQ yang berprestasi	100%	
8.	Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang disusun	4 Kebijakan	Kasubbag Kesejahteraan Sosial
		Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti	100%	
9.	Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	5 Perda	Kasubbag Peraturan perundang-undangan
		Jumlah rancangan peraturan Bupati yang difasilitasi	30 Perbup	
		Jumlah rancangan keputusan Bupati yang difasilitasi	450 SK	
10.	Penyusunan jawaban eksekutif	Prosentase jawaban eksekutif yang difasilitasi	100%	
11.	Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Persentase hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	Kasubbag Kajian dan Dokumentasi hukum
		Persentase dokumentasi secara manual dan digital	100%	
12.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Persentase permintaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100%	Kasubbag Bantuan Hukum
		Prosentase penyuluhan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	

13.	Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	1 Dokumen	Kasubbag Perekonomian
14.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Persentase rekomendasi hasil monev bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	80%	
15.	Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Jumlah kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	1 Dokumen 2 Laporan	Kasubbag Penanaman Modal dan BUMD
16.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti	80%	
17.	Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Perikanan	Jumlah kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun	3 Laporan	Kasubbag Sumber Daya Alam
18.	Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Perikanan	Persentase hasil Monev kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang ditindaklanjuti	80%	
19.	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk	100%	

		mendapatkan tindakan hukum		
20.	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang digunakan	3 Jenis	
21.	Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	Jumlah kebijakan penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang dihasilkan	1 Kebijakan	Kasubbag Penyusunan Program
		Sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	1 Sub Sistem	
		Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional Development System)	47 OPD	
22.	Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi <90 %	100%	Kasubbag Pengendalian
23.	Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dok pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 Dokumen	Kasubbag Pelaporan dan Kinerja
24.	Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah	100%	

		dievaluasi ukuran kinerjanya		
25.	Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	Prosentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80%	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
26.	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	85%	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase penawaran peyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	75%	
27.	Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Persentase permasalahan yang di advokasi	100%	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
28.	Pembinaan pengadaan barang dan jasa	Persentase OPD dengan pemaketan PBJ yang sesuai	95%	
29.	Monev Kelembagaan, Anjab, dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaanya	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan
		Persentase OPD yang sudah memanfaatkan hasil ANJAB dan ABK nya	100%	
30.	Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	Persentase pegawai sekretariat daerah yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100%	Kasubbag Kepegawaian
		Persentase disiplin pegawai sekretariat daerah	100%	

		Hasil Perjanjian Kinerja Individu dengan nilai diatas 90 %	100%	
31.	Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100%	Kasubbag Ketatalaksanaan
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standart Pelayanan dan SOP	100%	
		Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja	95%	
32.	Penyediaan barang/ Jasa Perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	22.440 buah	Kasubbag TU
		Jumlah BBM yang disediakan	2 Jenis	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas Pajaknya	30 Unit	
		Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	3 Jenis	
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	2 Jenis	
		Jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	20 Jenis	
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran	42 Orang	
		Jumlah jam lembur yang terbayar	3500 Jam	
33.	Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	

34.	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	189 Buah	
		Jumlah pakaian hari- hari tertentu yang tersedia	189 Buah	
35.	Penyediaan barang / jasa perkantoran	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	Kasubbag Keuangan
36.	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	65 Orang / Bulan	
		Jumlah Laporan keuangan PD yang tersusun	17 Laporan	
37.	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Tersusunya laporan barang milik daerah	7 Laporan	Kasubbag Perencanaan dan Perlengkapan
38.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	20 Jenis	
39.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	4 Gedung	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	33 Unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	15 Jenis	

40.	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	8 Dokumen	
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dokumen	
41.	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 Dokumen	
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 Laporan	
42.	Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi protokoler	100%	Kasubbag Protokol
43.	Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Jumlah dan jenis kebutuhan rumah tangga pimpinan daerah yang dipenuhi	100%	Kasubbag Rumah Tangga

Tabel 2.6 Tabel Perjanjia Kinerja Pejabat Pengawas / Eselon IV

2.3.4 Anggaran Per Program / Kegiatan

URAIAN	ANGGARAN
<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>26.894.223.388,00</i>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.894.223.388,00
<i>BELANJA LANGSUNG</i>	<i>41.541.608.299,00</i>
<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>	<i>12.645.660.184,00</i>
Penyediaan barang/jasa perkantoran	6.872.106.860,00
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	757.938.980,00
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	6.585.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3.588.714.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1.389.510.660,00

Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	24.285.000,00
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	727.500,00
Penyusunan laporan keuangan	5.792.184,00
<i>Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik</i>	<i>776.852.080,00</i>
Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	591.345.000,00
Monev Kelembagaan, Anjab, dan Reformasi Birokrasi	148.825.000,00
Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	36.682.080,00
<i>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum</i>	<i>1.126.938.660,00</i>
Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	395.210.000,00
Penyusunan jawaban eksekutif	11.584.800,00
Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	250.453.860,00
Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	469.690.000,00
<i>Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan</i>	<i>1.268.766.145,00</i>
Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	398.949.000,00
Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	413.252.900,00
Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	143.234.200,00
Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	313.330.045,00

<i>Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</i>	9.776.601.570,00
Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	5.625.080.580,00
Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	1.051.139.740,00
Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	3.100.381.250,00
<i>Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	1.972.143.386,00
Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah	132.010.965,00
Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	999.438.501,00
Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	248.470.000,00
Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	238.171.500,00
Fasilitasi kerjasama	354.052.420,00
<i>Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD</i>	866.647.090,00
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	40.073.850,00
Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	65.900.000,00
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan	49.850.000,00
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	362.423.240,00

Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	128.400.000,00
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	0
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	216.500.000,00
Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal Bersama dg Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yg diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah	3.500.000,00
<i>Program Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>2.575.185.304,00</i>
Fasilitas dan pengelolaan LPSE	890.963.124,00
Fasilitas pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	455.691.940,00
Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	441.327.840,00
Pembinaan pengadaan barang dan jasa	787.202.400,00
<i>Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.</i>	<i>10.532.813.880,00</i>
Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	3.884.185.400,00
Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	6.648.628.480,00

Tabel 2.7 Anggaran Per Program Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Untuk memastikan Prioritas Pembangunan Daerah telah tercapai, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/732/438.1.1.3/2019 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo berperan dalam mewujudkan ketercapaian Prioritas Pembangunan Daerah, melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Nilai SAKIP Kabupaten	A (Memuaskan)	*)	*)
2	Status Kinerja LPPD	ST (Sangat Tinggi)	*)	*)

Tabel 3.1 Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

*) Angka belum direlease oleh Instansi terkait

Target Tahun 2020 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, Nilai SAKIP Kabupaten adalah A (Memuaskan). Sehubungan dengan penyerahan Hasil Evaluasi belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan Nilai BB (Sangat Baik) masih belum memenuhi target.

Demikian pula untuk Status Kinerja LPPD juga belum direlease oleh Kementerian Dalam negeri, namun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dengan status Sangat Tinggi (ST) maka capaian telah memenuhi target.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran kinerja jangka menengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2020, dengan target dari indikator kinerja tujuan di tahun 2020, sebagai progres pencapaian.

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	A	*)	-
		Status Kinerja LPPD	ST	*)	-
		NILAI PMPRB	70	*)	-

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

*) Angka belum direlease oleh Instansi terkait

Berdasarkan tabel tersebut, untuk Nilai SAKIP, Status Kinerja LPPD dan Nilai PMPRB Kabupaten masih belum direlease. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah

b. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja tahunan / sasaran tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2020 dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2020, sebagaimana pada Renstra yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	100%	100%	Bagian Hukum	Produk Hukum	
		2.Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang :						
		a. Pemerintahan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS dan Instruksi	
		b. Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat		
		c. Perekonomian	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian		
		d. Pembangunan	100%	100%	100%	Bagian Pembangunan		
		e. Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	Bagian PBJ		
		f. Organisasi	100%	100%	100%	Bagian Organisasi		
		3.Persentase IKU OPD yang mencapai Target	100%	63,64%	63,64%	Bagian Pembangunan	Data Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
		4.Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Hasil Penilaian SKM	
5.Nilai SKM Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah	75	86,98	116%	Bagian Umum	Hasil Penilaian SKM di Sekretariat Daerah			
6.Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	75	85	113,30%	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Hasil Penilaian SKM pada Pimpinan Daerah			

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Tahunan

Adapun penjelasan mengenai capaian Pengukuran Kinerja Tahunan sebagai berikut :

1. Presentase produk hukum daerah yang diimplementasikan

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Presentase produk hukum daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	Bagian Hukum	Produk Hukum

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Hukum

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian hukum telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun produk hukum yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 101 Produk hukum dengan rincian 5 Perda dan 96 Perbup.

2. Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Pemerintahan

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian pemerintahan telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 26 kebijakan daerah dengan rincian 18 Naskah kerja sama, 4 Peraturan Bupati, 2 Surat Keputusan dan 2 Surat Edaran.

3. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian kesejahteraan rakyat telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 1 kebijakan daerah dengan rincian 1 Surat Keputusan.

4. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Perekonomian Dan Sda

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Perekonomian	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Perekonomian

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian perekonomian dan sumber daya alam telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 9 kebijakan daerah dengan rincian 8 Surat Keputusan dan 1 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

5. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Pembangunan

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Pembangunan	100%	100%	100%	Bagian Pembangunan	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS dan Instruksi

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Pembangunan

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian pembangunan telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 2 kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Capaian ini telah memenuhi target Renstra tahun 2020 sebesar 100%.

6. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Pengadaan Barang Jasa

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Tahunan Pengadaan Barang Jasa

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian pbj telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang ditetapkan dan dapat diimplementasikan tahun 2020 adalah 1 kebijakan daerah berupa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo

7. Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Organisasi

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk bidang Organisasi	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	kebijakan daerah berupa SK, SE, MOU, PKS, instruksi

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Tahunan Bidang Organisasi

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian organisasi telah tercapai 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun kebijakan daerah yang telah ditetapkan dan dapat diimplementasikan pada tahun 2020 adalah 16 kebijakan daerah berupa 10 Surat Edaran dan 6 Peraturan Bupati.

8. Persentase IKU OPD yang mencapai target

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase IKU OPD yang mencapai target	100%	63,64%	63,64%	Bagian Pembangunan	Data Capaian kinerja perangkat daerah

Tabel 3.11 IKU OPD yang mencapai target

IKU OPD yang memenuhi target di tahun 2020 sebanyak 63 IKU dari 99 IKU atau tercapai 63,64%, namun masih ada data yang belum release yaitu 9 IKU. IKU OPD

dimaksud adalah IKU OPD yang mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD).

9. Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Hasil Penilaian SKM

Tabel 3.12 Nilai SKM dengan Kategori Baik

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian organisasi telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Dengan melakukan penilaian pada seluruh OPD pelayanan pada Kabupaten Sidoarjo.

10. Nilai SKM Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupate Sidoarjo	Nilai SKM dengan Kategori Baik	75	86,98	115,97%	Bagian Umum	Hasil Penilaian SKM di Sekretariat Daerah

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Umum

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian umum telah tercapai 115,97 % dari target yang ditetapkan. Adapun nilai SKM Pelayanan Kesekretariatan pada tahun 2020 telah tercapai dengan nilai 86,98 dari target yang ditetapkan sebesar 75.

11. Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)	Penanggung Jawab	Data Pendukung
-----	---------	---------------------------	-------------------	----------------------	-------------	------------------	----------------

1	Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	75	85	113,3%	Bagian Protokol dan Rumah Tangga	Hasil Penilaian SKM pada Pimpinan Daerah
---	--	---	----	----	--------	----------------------------------	--

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Tahunan Bagian Protokol dan Rumah Tangga

Dari tabel diatas maka capaian kinerja sasaran untuk bagian protokol dan rumah tangga telah tercapai 113,3 % dari target yang ditetapkan. Adapun nilai SKM Pelayanan kepada pimpinan daerah pada tahun 2020 telah tercapai dengan nilai 85 dari target yang ditetapkan sebesar 75.

c. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

1. Implementasi Produk Hukum Daerah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target implementasi produk hukum daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1.	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	100% (5 Perda, 96 Perbup)	100%

Tabel 3.15 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Hukum



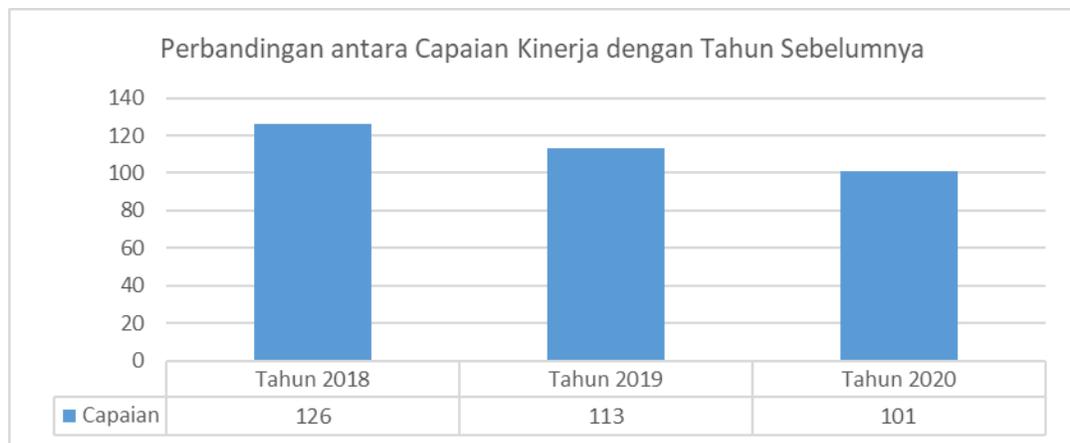
Grafik 3.1 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Hukum

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja indikator sasaran prosentase implementasi produk hukum daerah telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebagaimana tabel dan grafik diatas, adapun rincian implementasi produk hukum daerah tahun 2020 adalah 101 Produk hukum dengan rincian 5 Perda dan 96 Perbup.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi produk hukum daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase implementasi produk hukum daerah	100% (126)	100% (113)	100% (101)

Tabel 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Hukum



Grafik 3.2 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Hukum

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja prosentase implementasi produk hukum daerah tahun 2020 sama dengan realisasi tahun 2019 dan 2018. Dari sisi produktifitasnya terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2020, hal ini dikarenakan pembentukan produk hukum daerah disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum dimaksud sehingga keberadaan produk hukum tersebut dapat dilaksanakan (terimplementasi).

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi produk hukum daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	100%	100%

Tabel 3.17 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Hukum



Grafik 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Hukum

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja prosentase implementasi produk hukum tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD adalah 100 %, hal ini mengadung bahwa konsekuensi produk hukum yang disusun setiap tahun sudah terimplementasikan dengan baik.

2. Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan bidang pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%

Tabel 3.18 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pemerintahan

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100 % dari target jangka menengah.

Sebagaimana tabel data tersebut diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dengan kebijakan daerah sebagai berikut :

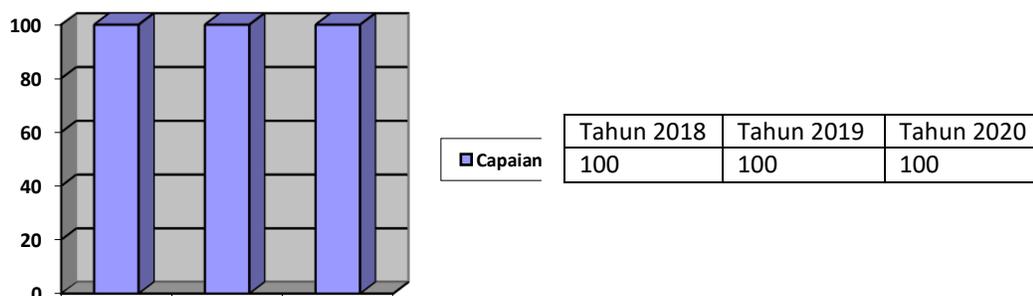
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanaman Jalan, Tempat Wisata, Taman, Kawasan Perumahan, Bangunan Gedung dan Penomoran Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo
12. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/18/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 di Lingkungan Pemkab Sidoarjo

13. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/766/438.1.1.3/2020 tentang Nama Jalan dan Bangunan Gedung di Kabupaten Sidoarjo
14. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/334/438.1.1.3/2020 tentang Tim Kerja Pembakuan Rupabumi di Kabupaten Sidoarjo
15. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 130/3108/438.1.1.1/2020 tentang Perubahan Refocusing DAU Kelurahan Tahun 2020
16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%

Tabel 3.19 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Pemerintahan



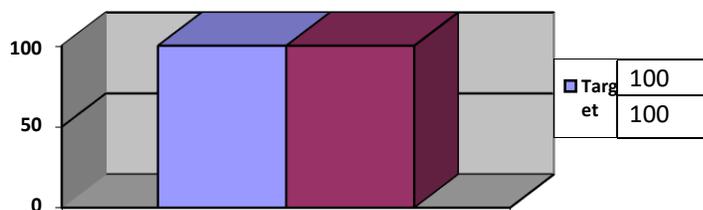
Grafik 3.4 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Pemerintahan

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 dari tahun 2019, dengan sebesar 100 %.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%

Tabel 3.20 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Pemerintahan



Grafik 3.5 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Pemerintahan

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja prosentase implementasi produk hukum tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD adalah 100 %, hal ini mengadung bahwa konsekuensi produk hukum yang disusun setiap tahun sudah terimplementasikan dengan baik.

3. Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian
1.	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk : Bidang Kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	100 %

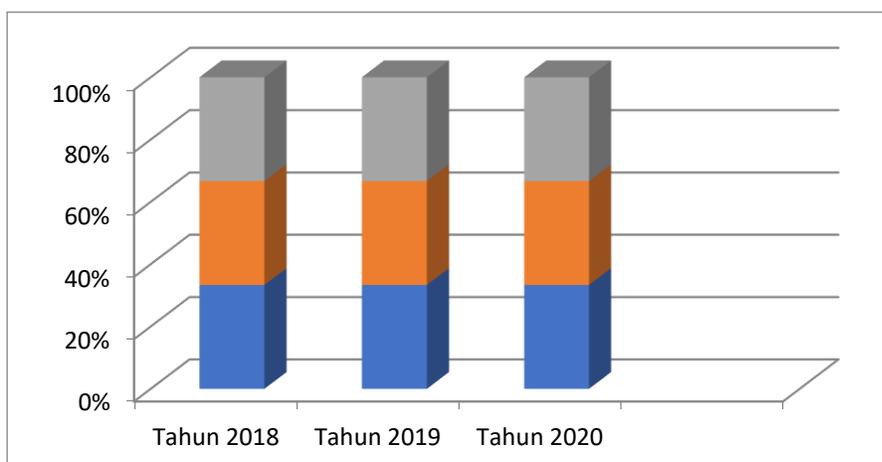
Tabel 3.21 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana tabel data tersebut diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dengan kebijakan daerah berupa satu Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/210/438.1.1.3/2020 tentang Penghargaan bagi Hafid Hafidzah dan Pembina Qori Qoriah di Kabupaten Sidoarjo

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implemetasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Kesra	100%	100%	100%

Tabel 3.22 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Kesejahteraan Rakyat



Grafik 3.6 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

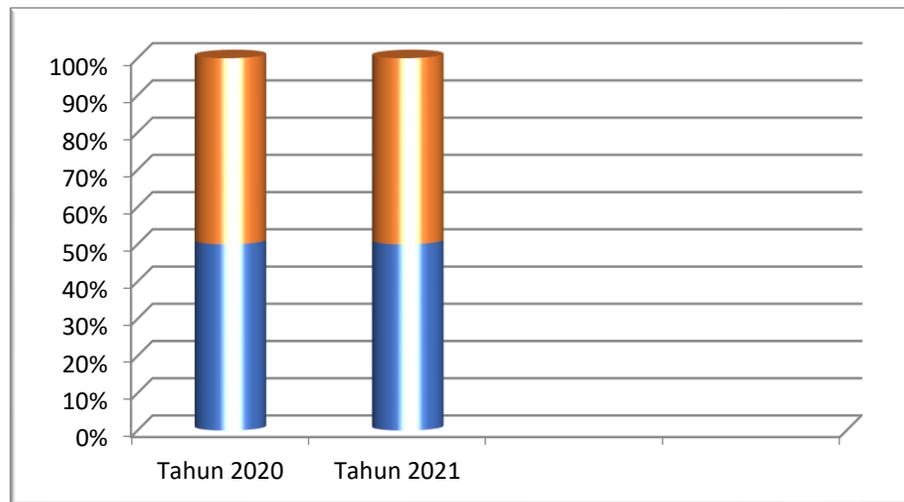
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat antara tahun 2020 dan tahun 2019 adalah 100%.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implemetasi kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Kesra	100%	100%	100%

Tabel 3.23 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Kesejahteraan Rakyat



Grafik 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan table dan grafik tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat mencapai 100% dari target jangka menengah.

4. Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian

i Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Perekonomian

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian
1.	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk : Bidang Perekonomian	100%	100%	100%

Tabel 3.24 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Perekonomian



Grafik 3.8 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Perekonomian

Sebagaimana tabel data tersebut diatas, dapat dilihat rincian realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dengan kebijakan daerah berupa 1 Perbub dan 8 Surat Keputusan dengan rincian kebijakan daerah yang terdiri dari :

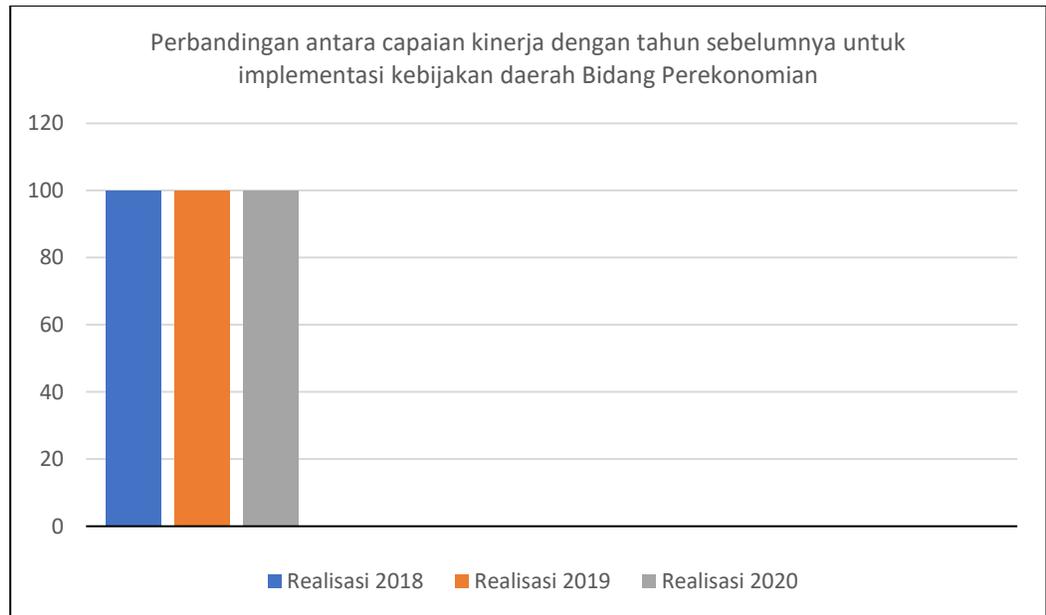
1. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/332/438.1.1.3/2020 tentang Tim Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, dengan membuat rapat kerja BUMD sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/387/438.1.1.3/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo, telah diimplementasikan oleh PD Aneka Usaha;
3. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/457/438.1.1.3/2020 tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, dikoordinasikan kepada OPD sebagai anggota tim dan ditindaklanjuti dengan kegiatan sidak dan pelaporan stok bahan pokok;
4. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/471/438.1.1.3/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo, telah diimplementasikan oleh PDAM Delta Tirta;
5. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/520/438.1.1.3/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo, untuk disampaikan kepada OPD terkait untuk mengkoordinir pengumpulan data terkait TPID;
6. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/519/438.1.1.3/2020 tentang Tim Pemantauan, Pengawasan, serta Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 kg Bersubsidi Tepat Sasaran di Kabupaten Sidoarjo, dengan dikoordinasikan kepada OPD sebagai anggota tim dan ditindaklanjuti dengan kegiatan monev pada tahun anggaran berikutnya;
7. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/745/438.1.1.3/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo, telah diimplementasikan oleh PD Aneka Usaha;
8. SK Bupati Sidoarjo Nomor : 188/748/438.1.1.3/2020 tentang Penugasan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dalam Pengelolaan Participating Interest Pada Wilayah Kerja Brantas, telah disampaikan kepada BUMD Provinsi sebagai salah satu syarat BUMD Daerah Pengelola PI 10% di WK Brantas;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, telah disampaikan kepada BPR Delta Artha sebagai Pelaksana Teknis penyaluran KURDA dan kepada OPD Pembina Teknis untuk melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan KURDA, serta Pengawas Internal Pemkab Sidoarjo untuk melakukan pengawasan

atas pelaksanaan KURDA sebagai tindakan yang bersifat preventif. Bagian Perekonomian dan SDA Bersama OPD Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja KURDA.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Perekonomian

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1.	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk : Bidang Perekonomian	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.25 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Perekonomian



Grafik 3.9 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Perekonomian

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 sama seperti dua tahun sebelumnya (2018 dan 2019) telah tercapai 100%.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Perekonomian

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1.	Persentase implementasi kebijakan daerah untuk : Bidang Perekonomian	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.26 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Perekonomian



Grafik 3.10 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Perekonomian

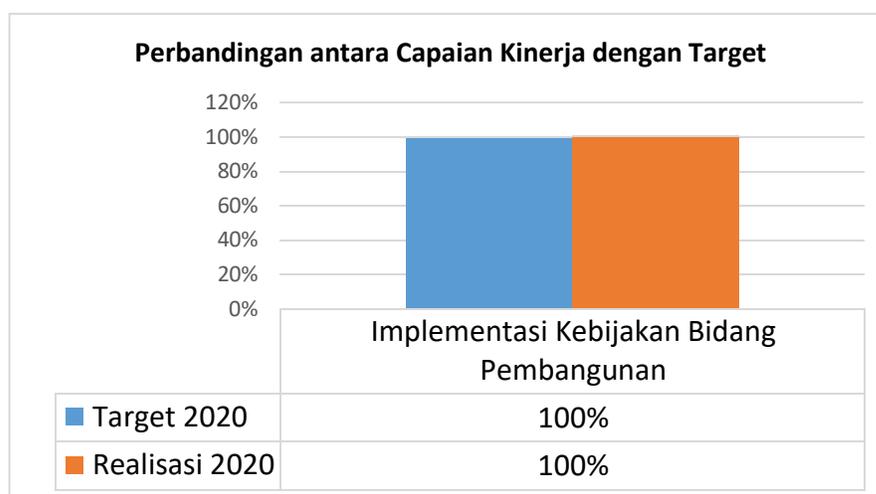
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target jangka menengah.

5. Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan

i Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah : Bidang Pembangunan	100% (2 kebijakan)	100% (2 kebijakan)	100%

Tabel 3.27 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pembangunan



Grafik 3.11 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Pembangunan

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target tahun 2020, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan telah memenuhi target, atau tercapai 100%, yaitu berupa 2 kebijakan yang diimplementasikan yaitu :

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

ii Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase implementasi kebijakan daerah : Bidang Pembangunan	100% (1 Kebijakan)	100% (1 Kebijakan)	100% (2 Kebijakan)

Tabel 3.28 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bagian Pembangunan



Grafik 3.12 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bagian Pembangunan

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan realisasi di tahun 2019 dan tahun 2018, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan selalu tercapai dari tahun ke tahun, yaitu 100%.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah : Bidang Pembangunan	100% (2 kebijakan)	100%	100%

Tabel 3.29 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bagian Pembangunan



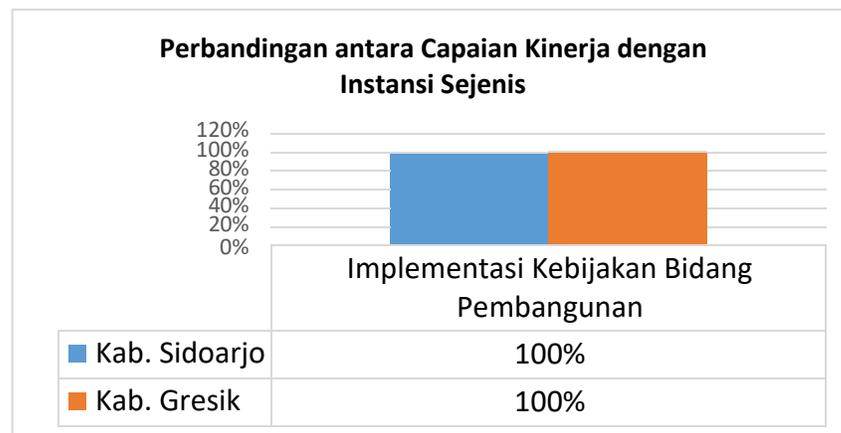
Grafik 3.13 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bagian Pembangunan

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pembangunan berada dalam kondisi tercapai, meskipun masih harus dipertahankan untuk selalu dapat diimplementasikan.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo	Realisasi Tahun 2020 Kabupaten Gresik	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah : Bidang Pembangunan	100% (2 kebijakan)	100%	100%

Tabel 3.30 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis Bidang Pembangunan



Grafik 3.14 Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis Bidang Pembangunan

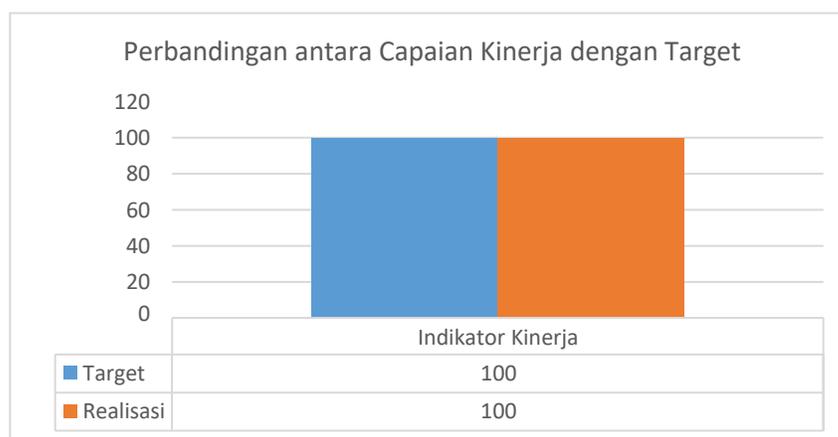
Apabila dibandingkan antara capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo dengan capaian kinerja Kabupaten Gresik, maka Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik sama – sama selalu berupaya mengimplementasikan kebijakannya.

6. Implementasi Kebijakan Daerah Di Bidang PBJ

i Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang PBJ

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang PBJ	100 %	100%	100%

Tabel 3.31 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang PBJ



Grafik 3.15 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang PBJ

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100 % dari target. Kebijakan daerah bidang pengadaan barang dan jasa yang disusun dan diimplementasikan di Tahun 2020 sejumlah satu (1) kebijakan yaitu Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/784/438.1.1.3/2020 tentang Tim Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Sidoarjo

ii Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang PBJ

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang PBJ	100 %	100%	100%

Tabel 3.32 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang PBJ



Grafik 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang PBJ

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 menurun dari tahun 2019 dengan penurunan 1 Level.

iii Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implemetasi kebijakan daerah Bidang PBJ

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang PBJ	100 %	100%	100%

Tabel 3.33 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang PBJ



Grafik 3.17 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang PBJ

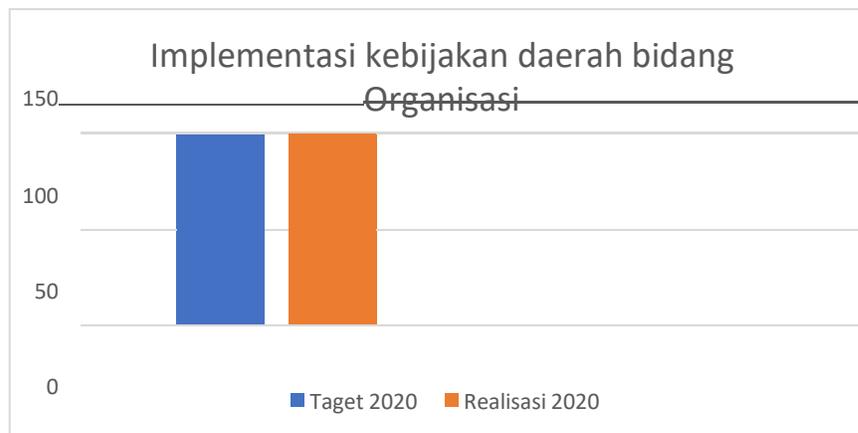
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target jangka menengah. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa berada dalam kondisi tercapai, meskipun masih harus dipertahankan untuk selalu dapat diimplementasikan.

7. Implementasi Kebijakan Daerah Di Bidang Organisasi

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Organisasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi	100%	100%	100%

Tabel 3.34 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Organisasi



Grafik 3.18 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target Bidang Organisasi

Berdasarkan table dan grafik di atas, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target tahun 2020, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi telah memenuhi target, atau tercapai 100%, yaitu berupa 10 SE dan 6 Perbup, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sidoarjo
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Dari Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus

Disease 2019 Di Kabupaten Sidoarjo

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Kampung Tangguh Di Kabupaten Sidoarjo
7. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/2106/438.1.3.1/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
8. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/2306/438.1.3.1/2020 tentang Pemberlakuan Presensi Online dan Sistem Flexible Working Arrangement (FWA) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
9. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/2798/438.1.3.1/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Sistem Flexible Working Arrangement (FWA) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
10. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/2318/438.1.3.1/2020 tentang Perpanjangan Kedua atas Pemberlakuan Sistem Flexible Working Arrangement (FWA) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
11. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/3104/438.1.3.1/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Guna Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
12. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/3564/438.1.3.1/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
13. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/4476/438.1.3.1/2020 tentang Sistem Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
14. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/5735/438.1.3.1/2020 tentang Pengaturan Kehadiran Pegawai pada Tempat Kerja/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
15. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/7238/438.1.3.1/2020 tentang Sistem

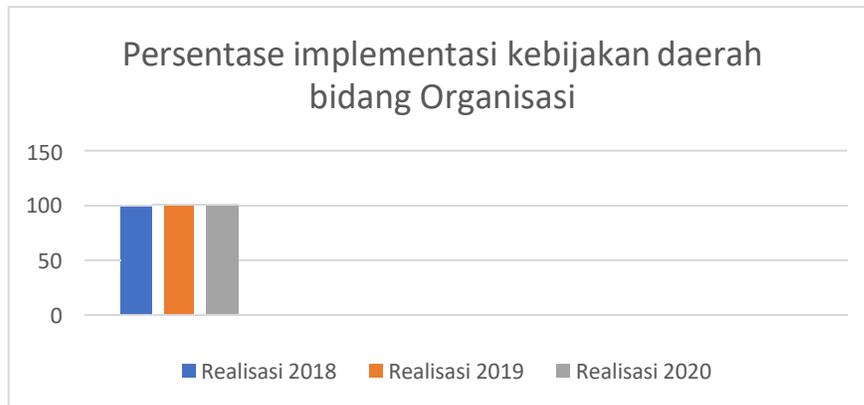
Kerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

16. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 065/8641/438.1.3.1/2020 tentang Pemberitahuan Jam Kerja

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Organisasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi	100%	100%	100%

Tabel 3.35 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Organisasi



Grafik 3.19 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Bidang Organisasi

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan realisasi di tahun 2019 dan tahun 2018, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi selalu tercapai 100% dari tahun ke tahun.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk implementasi kebijakan daerah Bidang Organisasi

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase implementasi kebijakan daerah bidang Organisasi	100%	100%	100%

Tabel 3.36 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Organisasi



Grafik 3.20 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Bidang Organisasi

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka Implementasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi berada dalam kondisi tercapai, meskipun masih harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.

8. Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase OPD pelayanan publik	100 %	100 %	100 %
	dengan nilai SKM minimal berkategori baik			

Tabel 3.37 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik



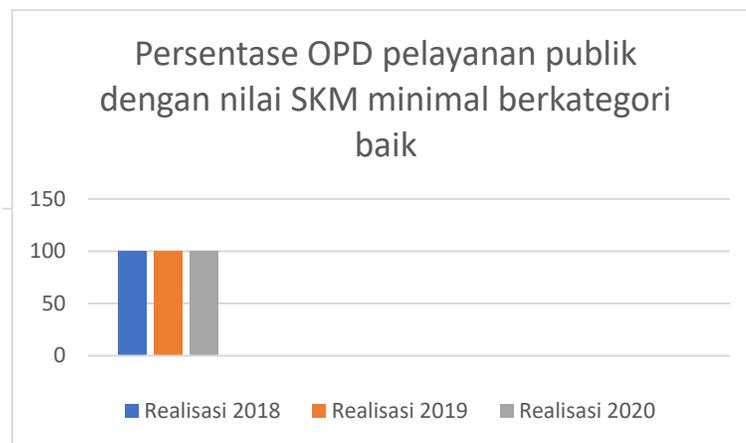
Grafik 3.21 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target tahun 2020, maka Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik telah memenuhi target, atau tercapai 100%, yaitu dengan capaian kinerja OPD Pelayanan dengan Nilai SKM Kategori Baik telah tercapai 100%, 48 OPD berkategori “Sangat Baik” dan 17 OPD berkategori “Baik”.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik	100%	100%	100%

Tabel 3.38 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik



Grafik 3.22 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019, maka Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik telah sama-sama memenuhi target, atau tercapai 100%. Pada tahun 2020, semua OPD atau 48 OPD nilai SKM nya berkategori Sangat Baik atau tidak ada yang berkategori Cukup maupun Kurang. Dari 49 OPD, 31 OPD berkatagori “Sangat Baik” dan 18 OPD berkatagori “Baik”.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik	100%	100%	100%

Tabel 3.39 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal Berkategori Baik



Grafik 3.23 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah Persentase Opd Pelayanan Publik Dengan Nilai Skm Minimal

Berkategori Baik

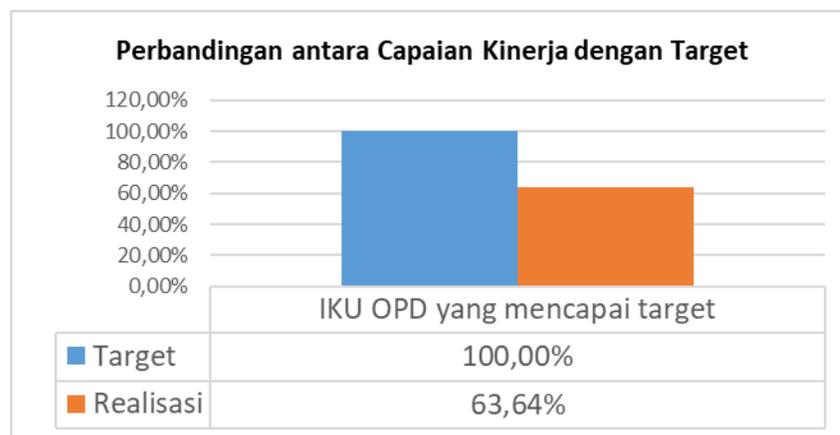
Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik telah tercapai 100%.

9. IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai target

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase IKU OPD yang mencapai target	100% (99 IKD)	63,64% (63 IKD)	63,64%

Tabel 3.40 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai target



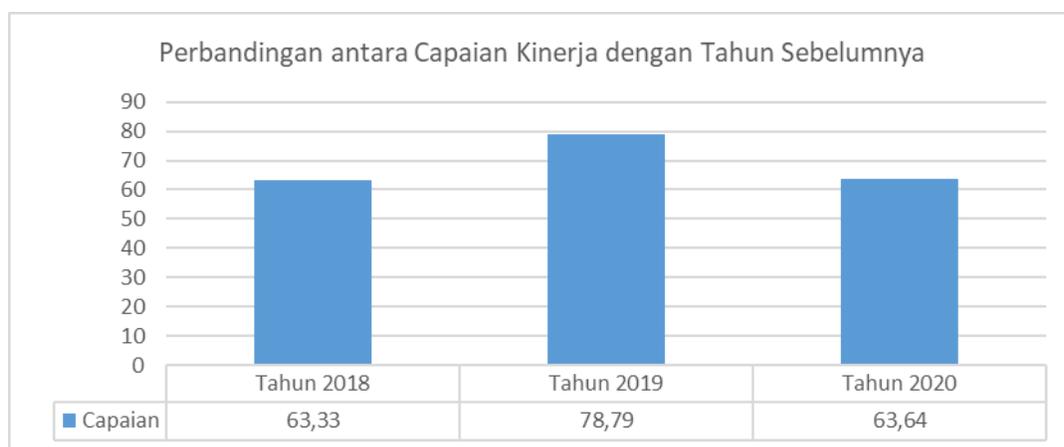
Grafik 3.24 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target IKU OPD yang mencapai target

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target tahun 2020, maka IKU OPD yang mencapai target masih belum memenuhi target, sehingga perlu langkah pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan OPD agar kinerja seluruh OPD tercapai.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Persentase IKU OPD yang mencapai target	63,33%	78,79%	63,64%

Tabel 3.41 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target



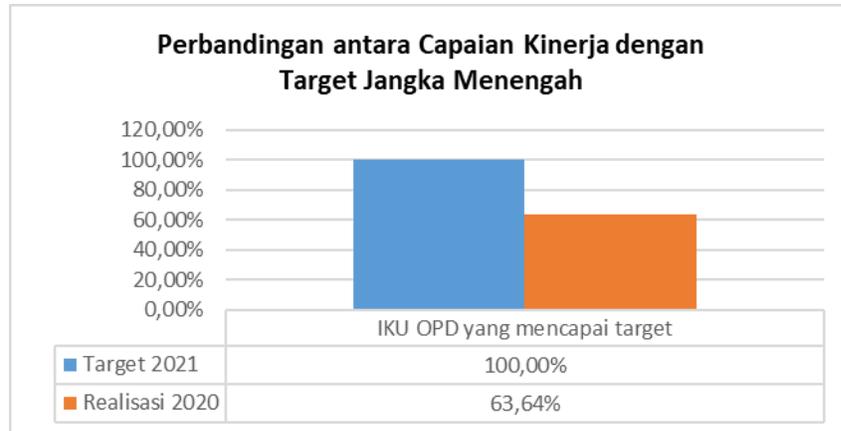
Grafik 3.25 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya IKU OPD yang mencapai target

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan realisasi di tahun 2019, maka IKU OPD yang mencapai target mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Persentase IKU OPD yang mencapai target	63,64%	100%	63,64%

Tabel 3.42 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target



Grafik 3.26 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah IKU OPD yang mencapai target

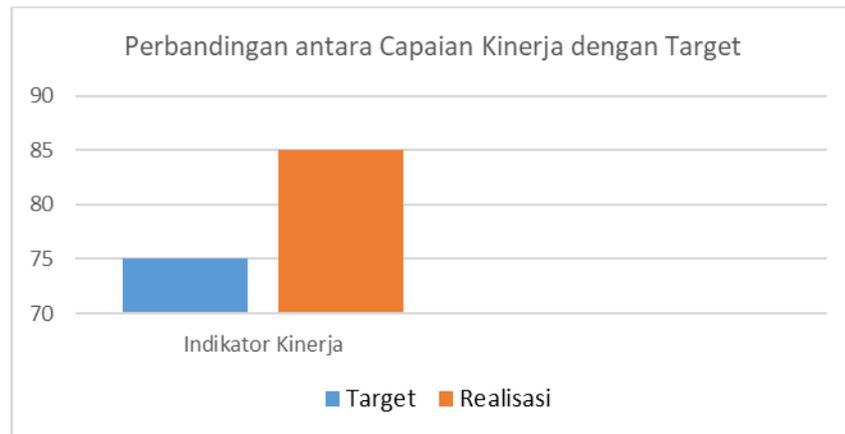
Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka IKU OPD yang mencapai target masih harus terus diupayakan agar dapat mencapai target 100% di tahun 2021.

10. Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	86,98	75	115,97

Tabel 3.43 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah



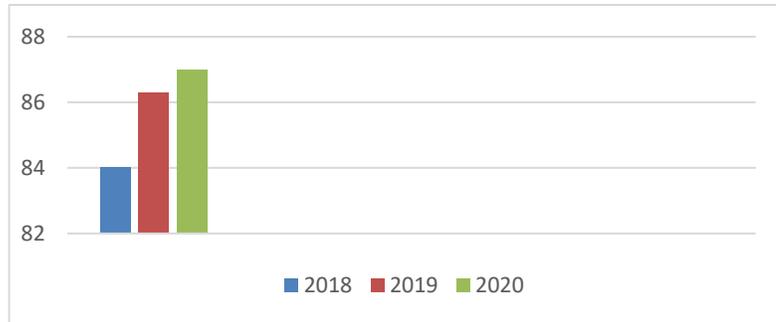
Grafik 3.27 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target tahun 2020, maka untuk SKM pelayanan Sekretariat Daerah sudah melebihi target, dengan pencapaian 115,97 %.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	84	86,3	86,98

Tabel 3.44 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah



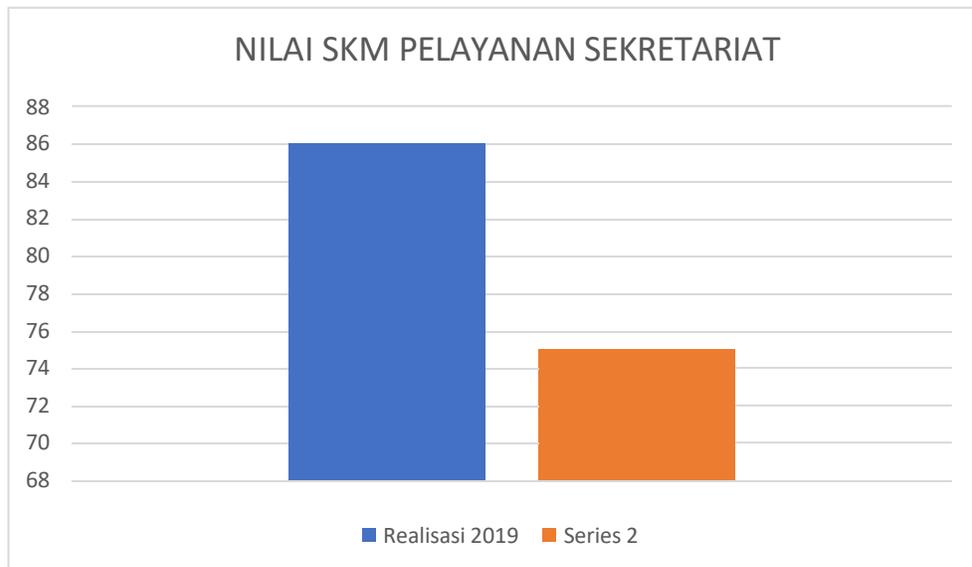
Grafik 3.28 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai SKM pada bagian umum semakin meningkat dalam pelayanan surat menyurat. Pada tahun 2018 penilaian SKM dilakukan mandiri oleh Bagian Umum namun pada tahun 2019 dan 2020 penilaian SKM dilakukan oleh PT KOKEK.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah	86,98	75	115,97 %

Tabel 3.45 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah



Grafik 3.29 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah

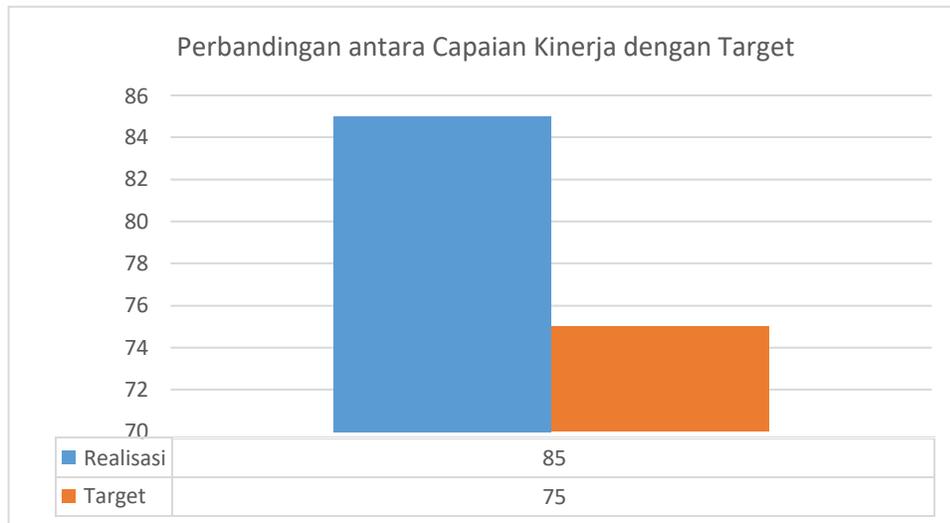
Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja di tahun 2020 dengan target di akhir periode Renstra tahun 2021, maka NILAI SKM PELAYANAN SEKRETARIAT berada dalam kondisi tercapai dan melebihi target, meskipun masih harus dipertahankan untuk selalu dapat memberikan pelayanan sekretariat sebaik mungkin.

11. Nilai SKM Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah

i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	85	75	113,3

Tabel 3.46 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah



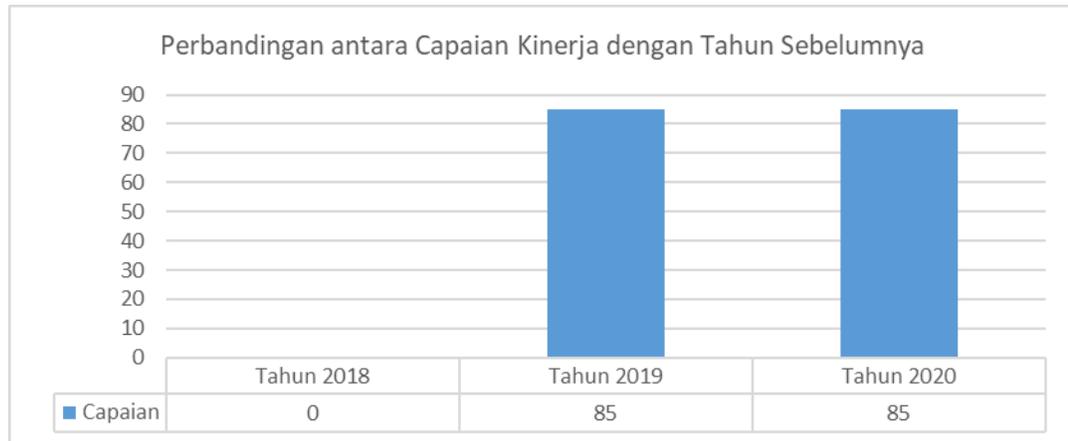
Grafik 3.30 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah melebihi target dan mencapai 113,3%.

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	NA	85	85

Tabel 3.47 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah



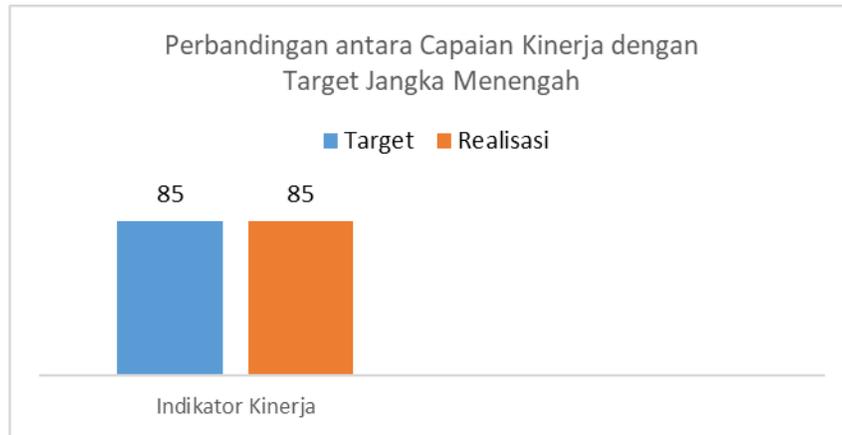
Grafik 3.31 Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2020 stabil dari tahun 2019, yakni dengan nilai 85.

iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	85	85	85

Tabel 3.48 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah



Grafik 3.32 Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah untuk Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 85 dari target jangka menengah.

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

➤ Analisis Keberhasilan dan Kegagalan sasaran

Berdasarkan data capaian kinerja diatas dapat disimpulkan capaian kinerja sasaran beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah sebagai berikut:

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Persentase implementasi produk hukum daerah	100%	Berhasil	Bagian Hukum	
		2. Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang :				
		a. Pemerintahan	100%	Berhasil	Bagian Pemerintahan	
		b. Kesejahteraan Rakyat	100%	Berhasil	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
		c. Perekonomian	100%	Berhasil	Bagian Perekonomian	
d. Pembangunan	100%	Berhasil	Bagian Pembangunan			

		e. Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Berhasil	Bagian PBJ
		f. Organisasi	100%	Berhasil	Bagian Organisasi
		3.Persentase IKU OPD yang mencapai Target	63,64%	Kurang	Bagian Pembangunan
		4.Persentase OPD Pelayanan dengan Nilai SKM dengan Kategori Baik	100%	Berhasil	Bagian Organisasi
		5.Nilai SKM Pelayanan Bagian Umum Sekretariat Daerah	116%	Sangat Berhasil	Bagian Umum
		6.Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah.	113,30%	Sangat Berhasil	Bagian Protokol dan Rumah Tangga

Tabel 3.49 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan sasaran

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

SASARAN : Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut ini penjelasan untuk Kendala, Upaya, Rencana Tindak Lanjut dan Simpulan untuk masing – masing indikator Sasaran.

A. INDIKATOR SASARAN 1 : Presentase Implementasi produk hukum daerah

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a. Adanya kendala pelaksanaan kegiatan adalah kurang responsifnya SKPD

inisiator produk hukum dalam mencakup kelengkapan berkas

- b. Untuk lebih meningkatkan kualitas kajian produk hukum yang diperlukan narasumber
- c. Perlunya penyesuaian website JDIH dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
- d. Pada kegiatan bantuan hukum, permasalahannya adalah pemberi kuasa tidak transparan terkait sengketa yang dialami dan sulitnya mencari alat bukti
- e. Permasalahan yang ada kompleksnya perlu ditelusuri lebih jauh/rinci

2) Upaya yang telah dilakukan :

- a. Perencanaan anggaran tahun berikutnya lebih memerhatikan dampak kejadian pandemi Covid19 dan mengintensif koordinasi dengan SKPD inisiator produk hukum
- b. Pada Tahun 2020 telah teranggarkan namun terkena refocusing dan Tahun 2021 telah dianggarkan Kembali
- c. Melakukan upgrade dan saat ini dalam tahap penyusunan bisnis proses
- d. Penerima kuasa bersurat langsung pada pemberi kuasa terkait pokok permasalahan yang dihadapi dan pentingnya alat bukti tersebut
- e. Melaksanakan rapat penyelesaian secara lebih rinci dengan melakukan mapping perkara

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- a. Membuat standar dan melakukan bintek kepada OPD terkait legal drafting penyusunan produk hukum.
- b. Lakukan perubahan tim penyusunan dengan substansi keanggotaan yang dikolaborasi antara sistem penunjukan dengan cara personal yang mempunyai kualitas dengan penunjukan OPD berdasar kewenangan;
- c. Menyusun SOP monitoring dan evaluasi terhadap implementasi produk hukum.

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan Analisa diatas maka indikator sasaran prosentase implementasi produk hukum sudah dapat dilaksanakan dengan baik namun demikian dalam rangka efektifitas ke depan perlu ditetapkan SOP dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi produk hukum yang telah ditetapkan.

B. INDIKATOR SASARAN 2 (a) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang pemerintahan

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Data yang Valid untuk rancangan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang diperlukan sulit diperoleh.
- Adanya Refocusing anggaran sehingga terdapat kegiatan monev yang belum terlaksana
- Analisa beban kerja tidak sesuai dengan jumlah ASN, sehingga terdapat ketimpangan beban kerja

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak terkait kebijakan pemerintah ketertiban, kesbang dan perlindungan masyarakat dan otoda yang akan dibuat.
- Melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan secara mandiri yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/564/438.1.1.3/2021 tentang Kecamatan Berkinerja Terbaik
- Telah disampaikan usulan penambahan staf pada Bagian Pemerintahan

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya:

- Akan meningkatkan capaian kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya untuk lebih baik

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan hasil analisa tersebut Sasaran ini telah berhasil, sebagaimana dapat dilihat berdasarkan hasil analisa tersebut Program pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama ini telah berhasil, karena realisas kinerja pada tahun 2020 telah sesuai dengan target tahunan yaitu 100%.

C. INDIKATOR SASARAN 2(b) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat

- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Kebijakan pada masing-masing sub bagian di bidang kesejahteraan rakyat masih ada yang belum dilaksanakan
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Menyusun sistem pada bidang Kesejahteraan Rakyat agar kebijakan dari masing-masing sub bagian dilaksanakan pada tahun 2020 apabila memungkinkan
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Subbag Agama dan Kemasyarakatan
 - Menyusun rumusan kebijakan makro
 - Menentukan prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi & misi pada RPJMD
 - Membuat rencana strategis dengan sinkronisasi OPD terkait kesejahteraan rakyat
 - Subbag Kesejahteraan Sosial
 - Membuat SK tim pelaksanaan program yang tertunda
 - Mengagendakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil berdasarkan DO (definisi operasional) terkait kebijakan daerah yang dihasilkan meliputi pembuatan SK (Surat Keputusan) dan data pendukung. Secara implementasi terdapat kebijakan yang sudah ditindaklanjuti sehingga menghasilkan *outcome* / kinerja yang baik.

D. INDIKATOR SASARAN 2(c) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang perekonomian

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Kebijakan pada masing-masing sub bagian di bidang perekonomian masih belum terintegrasi

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Menyusun sistem pada bidang perekonomian agar kebijakan dari masing-masing sub bagian dapat terintegrasi

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

i. Subbag Perekonomian

- Mengagendakan rapat kerja rutin dengan TPID
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KURDA dalam rangka pemulihan ekonomi
- Menyusun kajian ekonomi dan industry sebagai bahan penyusunan rumusan kebijakan

ii. Subbag BUMD dan BLUD

- Identifikasi dan evaluasi kebijakan BLUD
- Mengagendakan rapat kerja rutin dengan Tim BUMD dan BLUD
- Optimalisasi kegiatan Tim Pembina BUMD dan BLUD

iii. Subbag Sumber Daya Alam

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan OPD terkait rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang Sumber Daya Alam

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil berdasarkan DO (definisi operasional) terkait kebijakan daerah yang dihasilkan meliputi pembuatan SK (Surat Keputusan) dan Perbup (Peraturan Bupati). Secara implementasi terdapat kebijakan yang sudah ditindaklanjuti sehingga menghasilkan *outcome* / kinerja yang baik.

E. INDIKATOR SASARAN 2(d) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang pembangunan

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Kebijakan terkait implementasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan telah disusun berbasis elektronik, namun sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) maka integrasi data mendapatkan kendala teknis

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Menata kebutuhan dan sinkronisasi data untuk diimplementasikan ke Aplikasi
- Menentukan standart pengisian register resiko yang dapat menjadi early warning sistem untuk program kegiatan yang tidak terselesaikan tepat waktu, beserta decision support sistem atau mekanisme pengambilan keputusan

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- Menyusun juklak dan juknis tata cara monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan
- Menyusun juklak dan juknis tata cara evaluasi pembangunan daerah beserta mekanisme penyelesaian permasalahannya

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Perlu langkah optimalisasi agar di akhir tahun RPJMD semua target kinerja dapat tercapai

F. INDIKATOR SASARAN 2(e) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang pengadaan barang/ jasa.

1 Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Beberapa kekurangan variabel dalam Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan LKPP yang menunjukkan UKPBJ Kabupaten Sidoarjo berada di level 3 antara lain :
 - Variabel Tugas dan Fungsi Kelembagaan = belum adanya sinergi antara pemangku kepentingan (OPD, Pengguna, Penyedia, APH dan pimpinan daerah) di Kabupaten Sidoarjo
 - Variabel Sistem Informasi = belum adanya aplikasi yang dapat mengelola database pengadaan barang/jasa menyebabkan pengelolaan database belum terintegrasi, salah satu penyebabnya adalah tidak ada personil yang menangani pengembangan sistem informasi pada subbag LPSE
- Untuk variabel perencanaan SDM seharusnya sudah masuk dalam kategori level 4

karena pada Tahun 2020 UKPBJ Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki tiga orang Jabatan Fungsional yang dilantik pada Bulan Desember. Kemudian pada Tahun 2020 juga telah disusun Anjab dan ABK Bagian PBJ, tetapi dikarenakan ada koreksi bukti dokumen pendukung oleh LKPP sehingga UKPBJ Kabupaten Sidoarjo belum mencapai level 4.

2 Upaya yang telah dilakukan :

- Berkoordinasi dengan LKPP perihal koreksi dokumen bukti pendukung CoE
- Melakukan rekrutmen untuk tenaga pengembangan sistem aplikasi
- Melakukan koordinasi secara terus menerus dan menyusun kebijakan yang dapat mendorong sinergi antara pemangku kepentingan

3 Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

-

4 Simpulan atas pencapaian kinerja :

-

G. SASARAN 2(f) : Presentase Implementasi Kebijakan daerah bidang Organisasi.

1. Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Pada dasarnya tidak ada kendala maupun permasalahan dalam Implementasi Kebijakan daerah bidang Organisasi, karena kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh seluruh OPD.

2. Upaya yang telah dilakukan :

Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan Kebijakan daerah bidang Organisasi adalah dengan optimalisasi kegiatan yang sudah berjalan dengan lebih intensif melakukan pendampingan monev dan sosialisasi pada OPD.

3. Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

Rencana tindak lanjut terhadap implementasi kebijakan daerah bidang organisasi pada tahun berikutnya adalah akan terus dilakukan koordinasi yang lebih intens pada OPD terkait termasuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

4. Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan hasil analisa, program yang sudah dilaksanakan telah berhasil memenuhi target dan untuk selanjutnya akan terus ditingkatkan kualitasnya.

H. SASARAN 3 : Presentase IKU OPD yang mencapai target

1. Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Kebijakan terkait implementasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan telah disusun berbasis elektronik, namun sehubungan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) maka integrasi data mendapatkan kendala teknis.

2. Upaya yang telah dilakukan :

- Menata kebutuhan dan sinkronisasi data untuk diimplementasikan ke Aplikasi
- Menentukan standart pengisian register resiko yang dapat menjadi early warning sistem untuk program kegiatan yang tidak terselesaikan tepat waktu, beserta decision support sistem atau mekanisme pengambilan keputusan

3. Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- Menyusun juklak dan juknis tata cara monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan
- Menyusun juklak dan juknis tata cara evaluasi pembangunan daerah beserta mekanisme penyelesaian permasalahannya

4. Simpulan atas pencapaian kinerja :

Perlu langkah optimalisasi agar di akhir tahun RPJMD semua target kinerja dapat tercapai.

I. SASARAN 4 : Presentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik.

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Semua OPD pelayanan nilai SKM nya sudah minimal berkatagori Baik, bahkan beberapa OPD bernilai Sangat Baik, artinya realisasi kinerja sudah tercapai. Jadi tidak ada kendala / permasalahan yang dihadapi. Namun demikian kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat lebih baik dan akhirnya nilai SKM tidak hanya berkatagori Baik namun Sangat Baik.

2) Upaya yang telah dilakukan :

Upaya yang sudah dilakukan adalah dilakukannya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tatalaksana dan manajemen pelayanan public pada OPD pelayanan, pendampingan inovasi pelayanan, juga termasuk dilakukannya review terhadap kelembagaan OPD yang dirasa kurang efektif dan efisien.

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

Untuk tahun berikutnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah akan tetap melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tatalaksana dan manajemen pelayanan public pada OPD pelayanan, pendampingan inovasi pelayanan, juga termasuk dilakukannya review terhadap kelembagaan OPD yang dirasa kurang efektif dan efisien, serta akan diadakannya lomba inovasi pelayanan tingkat kabupaten.

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Secara target kinerja, sudah tercapai. Namun demikian kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat lebih baik dan akhirnya nilai SKM tidak hanya berkatagori Baik namun lebih dari itu yaitu Sangat Baik.

J. SASARAN 5 : NILAI SKM pelayanan Sekretariat Daerah.

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Kondisi Gedung yang sudah tua
- Kondisi sarana dan prasarana banyak yang sudah tidak layak pakai
- Permasalahan Aset yang masih sangat Rumit

- Kurangnya komitmen dalam mengumpulkan pendukung dokumen perencanaan dan pelaporan.

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Melakukan pemeliharaan Gedung
- Melakukan servis sarana prasarana sesuai permintaan
- Menekankan kepada pengurus barang agar dapat nya mengidentifikasi barang yang ada pada bagian sesuai yang tertera pada KIB
- Melakukan agenda rapat untuk evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- Pembangunan Gedung baru
- Pengadaan barang sesuai dengan pengajuan RKBMD dari bagian
- Mengadakan koordinasi mengenai barang secara intensif
- Mengadakan koordinasi mengenai perencanaan dan pelaporan secara intensif

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan nilai SKM pelayanan Sekretariat daerah, bagian umum sudah mendapatkan nilai baik seperti dari hasil survey oleh PT KOKEK. Namun pada tahun ini yang di survey hanya pelayanan dalam surat menyurat. Untuk kedepannya bagian umum akan melakukan survey menyeluruh dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesekretariatan.

K. SASARAN 6 : Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Kegiatan Pimpinan Daerah yang tidak direncanakan sebelumnya/ mendadak
- Kurangnya petugas Protokoler yang tidak sebanding dengan kegiatan Pimpinan Daerah yang ada
- Tidak adanya tenaga teknis yang membidangi masalah konstruksi

2) Upaya yang telah dilakukan :

- Lebih berkoordinasi secara intensif dengan ajudan dan sekretaris Pimpinan Daerah serta OPD terkait agar tidak terjadi tumpang tindih acara
- Memaksimalkan petugas Protokoler yang ada

3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :

- Koordinasi secara intensif dengan ajudan dan sekretaris Pimpinan Daerah serta OPD terkait;
 - Penambahan petugas Protokol
 - Penambahan tenaga teknis yang membidangi masalah konstruksi
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil. Sebagaimana data hasil capaian kinerja tersebut diatas, program pelayanan administrasi kegiatan Keprotokolan dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah terlaksana dengan baik capaian pada kedua indikatornya 100% terpenuhi.

Pada indikator program yang pertama yaitu: 1. Presentase penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan di tindaklanjuti tercapai 100%. Pada indicator program yang kedua 2. Presentase kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi Protokoler pelaksanaan dengan nilai rata-rata 85 atau berkatagori “PUAS”. Jadi capaian kinerja program pada indicator ini terlaksana 100% dan rata-rata berkatagori “PUAS”.

b. Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. TUJUAN

1.1 Nilai SAKIP Kabupaten

- 1) Penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang menjadi dasar penyusunan struktur organisasi dan cascading kinerja
- 2) Penguatan performance based organisasi agar struktur organisasi yang dibentuk efektif untuk mewujudkan kinerja yang diharapkan
- 3) Memastikan kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi

1.2 Status Kinerja LPPD

- 1) Membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih
- 2) Menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo

1.3 NILAI PMPRB

- 1) Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada OPD sebagaimana Road Map RB yang sudah dibuat;
- 2) Memberikan bimbingan teknis ataupun workshop terkait percepatan RB;
- 3) Memberikan reward pada OPD yang dinilai pelaksanaan RB nya paling baik.

2. SASARAN

2.1 Persentase implementasi produk hukum daerah

- 1 Memperbaiki SOP yang telah ada
- 2 Lakukan evaluasi internal secara berkala.

2.2 Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Pemerintahan

1. Menyusun rumusan kebijakan makro
2. Menyusun SK Tim Standar Pelayanan Minimal
3. Menyusun kebijakan terkait penegasan batas wilayah
4. Menyusun SK Penamaan Jalan
5. Menjalin sinkronisasi desa, kelurahan dan OPD teknis
6. Peningkatan penguatan kapasitas baik di kelurahan maupun kecamatan
7. Koordinasi intensif antara OPD teknis dan Bagian Pemerintahan selaku pembina kecamatan
8. Memaksimalkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan pihak OPD terkait.
9. Menyusun dan memfasilitasi rencana kerjasama daerah sesuai kebutuhan OPD

2.3 Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Menyusun rumusan kebijakan makro
2. Menentukan prioritas pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Membuat SK tim pelaksanaan program yang tertunda
4. Mengagendakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait
5. Membuat rencana strategis dengan sinkronisasi OPD terkait bidang kesejahteraan rakyat

2.4 Persentase implementasi kebijakan daerah Bidang Perekonomian

1. Mengagendakan rapat kerja rutin dengan TPID
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KURDA dalam rangka pemulihan ekonomi
3. Menyusun kajian ekonomi dan industri sebagai bahan penyusunan rumusan kebijakan
4. Identifikasi dan evaluasi kebijakan BLUD
5. Mengagendakan rapat kerja rutin dengan Tim BUMD dan BLUD
6. Optimalisasi kegiatan Tim Pembina BUMD dan BLUD
7. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dengan OPD terkait rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang Sumber Daya Alam

2.5 Persentase Implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

1. Menyusun kebijakan penyusunan Standart Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Biaya (ASB) dan Harga Satuan Paket Kegiatan (HSPK)

2.6 Persentase Implementasi kebijakan daerah Bidang Pengadaan Barang Jasa

1. Meminimalkan jumlah dokumen hardcopy yang perlu dicetak
2. Proses dilaksanakan secara elektronik lebih lengkap dan runtut karena ada panduan dari aplikasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan proses
3. Proses dan seluruh dokumen pengadaan terdokumentasi dalam server LPSE
4. Proses pengadaan menjadi transparan karena diumumkan secara luas melalui website LPSE

2.7 Persentase IKU OPD yang mencapai target

1. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala

2.8 Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal berkategori baik

1. Terus melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tatalaksana dan manajemen pelayanan publik pada OPD pelayanan;
2. Melakukan pendampingan inovasi pelayanan public;
3. Mengadakan lomba inovasi pelayanan dan pemberian reward terhadap OPD yang dinilai paling inovatif;
4. Melakukan review kelembagaan OPD.

2.9 Nilai SKM Pelayanan Sekretariat Daerah

1. Melakukan survey menyeluruh sesuai dengan semua yang dikerjakan oleh bagian umum dalam Program Pelayanan Kesekretariatan

2.10 Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah

1. Memaksimalkan koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan pihak OPD terkait.
2. Penambahan tenaga teknis yang membidangi bidang konstruksi dan administrasi konstruksi.

3.4 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

Adapun program dan kegiatan dalam mendukung kinerja Sekretariat Daerah akan diuraikan sebagaimana berikut ini:

1. BAGIAN HUKUM

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
-----	--------------------	--	--------	-----------	-------------	----------------------

1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	Prosentase rancangan peraturan perundang-undangan yang terbentuk	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase doktasi informasi hukum yang dipublikasikan	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	Berhasil
	Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	Jumlah penetapan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	5 perda	5 perda	100%	Berhasil
		Jumlah penetapan peraturan Bupati yang difasilitasi	30 perbub	96 perbub	100%	Berhasil
		Jumlah penetapan keputusan bupati yang difasilitasi	450 SK	829 SK	100%	Berhasil
	Penyusunan jawaban eksekutif	Persentase butir-butir pandangan umum DPRD yang ditindaklanjuti dengan jawaban eksekutif.	100 %	100 %	100%	Berhasil
	Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	Jumlah hasil kajian produk hukum yang ditindaklanjuti penyempurnaannya	5 Perda/ Perbup	5 Perda/ Perbup	100%	Berhasil
		Jumlah produk hukum yang didokumentasikan (manual dan elektronik)	500 produk hukum	1.081 produk hukum	100%	Berhasil

Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	Persentase kualitas penyelesaian permasalahan hukum litigasi	100 %	100 %	100%	Berhasil
	Persentase kualitas penyelesaian permasalahan hukum non litigasi	100 %	100 %	100%	Berhasil
	Persentase pemahaman hukum terkait peraturan yang berlaku	100 %	100 %	100%	Berhasil

Tabel 3.50 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Hukum

Permasalahan :

- Pada dasarnya kegiatan kajian ini tidak ada permasalahan, akan tetapi untuk anggaran yang tidak terserap merupakan anggaran yang bersifat penyediaan terdapat anggaran perjalanan dinas karena terdampak dengan covid 19 namun terkait kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan antara lain perlunya narasumber untuk kegiatan kajian serta penyesuaian/ pengembangan website JDIH,
- Pada Kegiatan Bantuan Hukum permasalahannya adalah pemberi kuasa tidak transparan terkait sengketa yang dialami dan sulitnya mencari alat bukti;
- Kurangnya Penyerapan anggaran diakibatkan kejadian pandemi covid 19 sehingga menurunkan intensitas perjalanan dinas termasuk menurunkan jumlah peserta rapat yang diundang dan yang menghadiri undangan. Adanya kendala pelaksanaan kegiatan adalah kurang resposifnya SKPD inisiator produk hukum dalam mencakup kelengkapan berkas.

Solusi :

- Dalam berbagai permasalahan tersebut telah dilakukan berbagai hal menganggarkan Narasumber serta upgrade/ pengembangan JDIH sampai saat ini dalam penyusunan bisnis proses (Bispro),

- Penerima Kuasa bersurat langsung pada pemberi kuasa terkait pokok permasalahan yang dihadapi dan pentingnya alat bukti tersebut;
- Perencanaan anggaran tahun berikutnya lebih memperhatikan dampak kejadian pandemi covid 19 dan mengintensif koordinasi dengan SKPD inisiator produk hukum

2. BAGIAN PEMERINTAHAN

	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Program <i>Pembinaan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerjasama</i>	Presentase Kebijakan daerah bidang pemerintahan yang diterapkan	100%	100%	100%	Berhasil
2	Kegiatan <i>Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan</i>	a. Jumlah laporan monev penyelenggaraan dan pemerintahan umum	a. 1 Doku men	a. 1 Dokum en	100%	Berhasil

	<i>pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta pelayanan dinas Kepala Daerah</i>	b. Jumlah laporan monev standar pelayanan minimal	b. 1 Dokumen	b. 1 Dokumen		
3	Kegiatan <i>Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi</i>	Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi data gasetir rupabumi unsur buatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100%	Berhasil
4	Kegiatan <i>Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan</i>	a. Jumlah Pilar batas Daerah b. Jumlah Laporan monev pemasangan pilar batas wilayah	a. - b. 1 Dokumen	a. - b. 1 Dokumen	100%	Berhasil
5	Kegiatan <i>Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan</i>	Persentase Kecamatan yang telah melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan kategori baik	100%	100%	100%	Berhasil
6	Kegiatan <i>Fasiltasi Kerjasama</i>	Persentase fasilitasi kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Berhasil

Tabel 3.51 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Pemerintahan

Penjelasan:

Bahwa capaian kinerja pada keseluruhan program dan kegiatan Bagian Pemerintahan telah mencapai target yang ditetapkan.

3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Program <i>Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	Persentase kebijakan daerah bidang Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan yang diterapkan dengan baik	100	100	100%	Berhasil
	Kegiatan <i>Koordinasi Penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang agama dan kemasyara-katan</i>	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang agama dan kemasyarakatan yang disusun	1	1	100%	Berhasil
	Kegiatan <i>Koordinasi Penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial</i>	Persentase rekomendasi hasil monev bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	4	4	100%	Berhasil
	Kegiatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan	10	10	100%	Berhasil

	<i>Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan</i>	rekomendasi, peserta MTQ yang menjadi juara, pelaksanaan kegiatan agama yang dilaksanakan				
--	---	---	--	--	--	--

Tabel 3.52 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Kesejahteraan Rakyat

Realisasi pada semua kegiatan telah mencapai target. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kegiatan pada Tahun 2020 tetap dilaksanakan hanya saja volumenya berkurang dikarenakan pandemi covid 19.

4. BAGIAN PEREKONOMIAN

	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1.	Program <i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD</i>	Persentase kebijakan daerah bidang perekonomian yang diterapkan dengan baik	100%	100%	100%	Berhasil
	Kegiatan <i>Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro,</i>	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang disusun	2 dok	2 dok	100%	Berhasil

	<i>Perindustrian dan Perdagangan</i>					
	<i>Kegiatan Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan</i>	Persentase hasil money kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%	Berhasil
	<i>Kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan</i>	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang sumber daya alam, pangan dan pertanian serta perikanan yang disusun	3 lap	5 lap	167%	Sangat berhasil
	<i>Kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu/tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran</i>	Jumlah temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita cukai yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum	-	-	-	-

<p>Kegiatan <i>Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai</i></p>	<p>Jumlah jenis media publikasi ketentuan terkait cukai yang digunakan</p>	<p>3 jenis</p>	<p>3 jenis</p>	<p>100%</p>	<p>Berhasil</p>
<p>Kegiatan <i>Operasi pemberantasan barang kena cukai illegal Bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah</i></p>	<p>Persentase temuan merk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau tidak berpita yang direkomendasikan untuk mendapatkan tindakan hukum</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Berhasil</p>

Kegiatan <i>Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD</i>	Jumlah rumusan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang disusun	3 dok	9 dok	300%	Sangat berhasil
Kegiatan <i>Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD</i>	Persentase hasil monev kebijakan daerah bidang penanaman modal dan BUMD yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%	Berhasil

Tabel 3.53 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Perekonomian

Realisasi pada semua kegiatan telah mencapai target. Pada kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Pangan dan Pertanian serta Perikanan dan kegiatan Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD realisasi melebihi target yang ditentukan.

Permasalahan :

Kebijakan pada masing-masing sub bagian di bidang perekonomian masih belum terintegrasi.

Solusi :

Membuat sistem pada bidang perekonomian agar kebijakan dari masing-masing sub bagian dapat terintegrasi

5. BAGIAN PEMBANGUNAN

No	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasi lan
----	-----------------------	--	--------	-----------	----------------	-----------------------------

1	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	Persentase Progress / Kemajuan Pengembangan Sistem Aplikasi RDS (Regional Development System)	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Program / Kegiatan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Target	100%	81,25%	81,25%	Cukup
		Persentase Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala) Yang Sesuai Ketentuan dan Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Yang Ukuran Kinerjanya telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	100%	100%	100%	Berhasil

A	Penyusunan pelaporan berkala daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	Jumlah dokumen pelaporan kinerja daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Berhasil
B	Fasilitasi penyusunan ukuran kinerja daerah	Persentase Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah dievaluasi ukuran kinerjanya	100%	100%	100%	Berhasil
C	Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan	Jumlah kebijakan penyusunan program / kegiatan perangkat daerah yang dihasilkan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	100%	Berhasil
		Jumlah sub sistem Aplikasi RDS (Regional Development System) yang dikembangkan	1 sub sistem	1 Sub Sistem	100%	Berhasil
		Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem aplikasi RDS (Regional Development System)	47 OPD	48 OPD	100%	Berhasil
D	Pengendalian kegiatan pembangunan daerah	Persentase OPD yang mempunyai nilai realisasi $\leq 90\%$	100%	83,33%	83,33%	Cukup

Tabel 3.54 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Pembangunan

Permasalahan :

1. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan yang masih kurang efektif untuk memberikan kontrol atas pelaksanaan paket pekerjaan yang tidak terselesaikan tepat waktu
2. Terdapat 8 (delapan) OPD yang Program Keegiatannya belum memenuhi target yang ditentukan di tahun 2020
3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2020 masih belum direlease oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga asumsi permasalahan masih berkuat pada SILPA yang terlalu tinggi.
4. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 masih belum direlease oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga orientasi peningkatan implementasi masih berkuat pada performance based organization.

Solusi :

1. Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi e-Kenda dengan memfungsikan fitur – fitur yang ada serta pemenuhan data yang diperlukan, yang nanti akan menjadi instrumen monitoring, evaluasi dan pengendalian
2. Menyusun SSH, ASB dan HSPK yang sesuai kebutuhan pasar untuk meminimalisir kemungkinan tidak terserapnya program dan kegiatan
3. Integrasi program kegiatan OPD dengan IKK yang terdapat pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang nanti akan disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB

6. BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA

No	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
----	--------------------	--	--------	-----------	-------------	----------------------

1	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan <i>Fasilitasi dan pengelolaan LPSE</i>	Level Kematangan Organisasi PBJ	Level 4	Level 3 (8/9 Variabel)	100%	Berhasil
	Kegiatan <i>Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ</i>	Prosentase ketersediaan layanan LPSE secara online	80%	80%	100%	Berhasil
		Persentase paket pengadaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkiraan RUP	266%	280%	105,26%	Sangat berhasil
	<i>Pembinaan pengadaan barang dan jasa</i>	Persentase penawaran penyedia yang memenuhi persyaratan dokumen pengadaan	128%	65%	50,78%	Kurang
		Terfasilitasinya permasalahan/pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa	100%	100%	100%	Sangat berhasil

	Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	Terwujudnya perencanaan dan pemilihan pengadaan barang dan jasa yang sesuai	95%	90%	94.74%	Berhasil
--	---	---	-----	-----	--------	----------

Tabel 3.55 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian PBJ

Permasalahan :

1. Dalam penyusunan kebijakan daerah seringkali terbentur dengan cepatnya perubahan aturan yang menjadi acuan penyusunan, contohnya adalah perubahan Peraturan Menteri PUPR tentang pengadaan barang/jasa, yang pada tahun 2020 terjadi 2 (dua) kali perubahan
2. Dalam implementasi kebijakan menghadapi kesulitan yaitu banyak yang tidak melaksanakan dikarenakan tidak adanya sanksi akibat tidak diterapkannya kebijakan dimaksud

Solusi :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat serta melakukan peningkatan kompetensi bagi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa agar terus update dengan peraturan-peraturan yang baru
2. Berkoordinasi dengan Inspektorat perihal sanksi bagi OPD yang tidak menerapkan kebijakan pengadaan barang/jasa

7. BAGIAN ORGANISASI

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = (4/3)*%)	(6)

<p>Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik</p>	<p>1) Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya ditindaklanjuti</p> <p>2) Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melakukan SKM</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Berhasil</p>
<p>1. Monev Kelembagaan, Anjab dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>1) Persentase Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti hasil Monev kelembagaannya</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Berhasil</p>
	<p>2) Persentase Perangkat Daerah yang telah dimonev Anjab ABK nya</p> <p>3) Nilai PMPRB</p>	<p>100%</p> <p>68</p>	<p>100%</p> <p>-</p>	<p>100%</p> <p>-</p>	

2. Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	1) Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM	100%	100%	100%	Berhasil
	2) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan dan SOP	100%	100%	100%	
	3) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kelompok budaya kerja				
3. Pelayanan administrasi Kepegawaian Setda	1) Persentase pegawai Setda yang puas terhadap pelayanan kepegawaian	100%	96,60%	96,60%	Berhasil
	2) Persentase disiplin pegawai Setda	100%	-	100%	
	3) Hasil perjanjian kinerja individu dengan nilai diatas 90	100%	81%	81%	

Tabel 3.56 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Organisasi

Sebagaimana table tersebut diatas, hampir semua Capaian kinerja program maupun kegiatan telah berhasil. Namun demikian capaian kinerja pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian setda belum bisa 100%, karena target capaian yang terlalu tinggi yaitu 100% untuk indikator kepuasan pelayanan, tingkat disiplin maupun terkait kinerja individu, yang semua itu tidak mungkin terjadi.

Permasalahan :

1. Persentase disiplin pegawai tidak bisa diukur karena adanya sistem kerja WFH/WFO dikarenakan pandemi covid19

Solusi :

1. Optimalisasi kegiatan yang sudah berjalan dengan lebih intensive melakukan pendampingan, Monev dan sosialisasi pada OPD

8. BAGIAN UMUM

No.	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100	Berhasil
	1. Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	22440 Buah	22440 Buah	100	Berhasil
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	67 Orang/Bulan	67 Orang/Bulan	100	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100	Berhasil
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	30 Unit	30 Unit	100	Berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang	3 Jenis	3 Jenis	100	Berhasil

	disediakan				
	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil
	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	2 jenis	2 jenis	100	Berhasil
	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	20 jenis	20 jenis	100	Berhasil
	Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	90 jenis	90 jenis	100	Berhasil
	Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	42 Orang	42 Orang	100	Berhasil
	Jumlah jam lembur yang terbayar	3500 jam	3500 jam	100	Berhasil

2. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Berhasil
3. Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	7 laporan	7 laporan	100	Berhasil
4. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100	Berhasil
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	20 jenis	20 jenis	100	Berhasil
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung/kantor / rumah	4 gedung	4 gedung	100	Berhasil
	dinas/jabatan yang dipelihara				
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	33 Unit	33 Unit	100	Berhasil
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	15 jenis	15 jenis	100	Berhasil

6. Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	189 buah	189 buah	100	Berhasil
	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	189 buah	189 buah	100	Berhasil
7. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	8 Dok	8 Dok	100	Berhasil
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dok	4 Dok	100	Berhasil
	Jumlah data dan informasi yang disusun	2 Dok	2 Dok	100	Berhasil
8. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 Dok	4 Dok	100	Berhasil
	Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 Dok	1 Dok	100	Berhasil
	Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100	Berhasil
9. Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	7 laporan	7 laporan	100	Berhasil

Tabel 3.57 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Umum

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan secara garis besar tidak ada permasalahan yang mampu mempengaruhi nilai dari kinerja. Namun masih adanya kendala di bagian umum disaat permintaan data mengenai kinerja, pengumpulan sangat lambat dan kualitas laporan dari bagian tidak sesuai yang diharapkan. Karena selalu memakai format yang berbeda meskipun telah ditentukan format pelaporannya.

Solusi :

Untuk memecahkan permasalahan yang ada maka upaya yang telah dilakukan adalah melakukan rapat intern secara intensive sehingga meningkatkan pemahaman dari bagian – bagian akan kualitas pelaporan kinerja.

9. BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA

No	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	Tingkat kepuasan pimpinan daerah terhadap layanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga	100 %	76,90	76,90%	Cukup
	1. Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	Persentase kegiatan pimpinan Daerah yang difasilitasi Protokoler	100 %	74,60 %	74,60%	Kurang
	2. Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Daerah yang Dipenuhi	100%	78,25%	78,25%	Cukup

Tabel 3.58 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung Bagian Protokol & Rumah Tangga

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan secara garis besar tidak ada permasalahan yang mampu mempengaruhi nilai dari kinerja. Namun masih adanya kendala diantaranya Kegiatan Pimpinan Daerah yang tidak direncanakan sebelumnya/ mendadak, Kurangnya petugas Protokoler yang tidak sebanding dengan kegiatan Pimpinan Daerah yang ada serta Tidak adanya tenaga teknis yang membidangi masalah konstruksi

Solusi :

Untuk memecahkan permasalahan yang ada maka upaya yang telah dilakukan adalah lebih berkoordinasi secara intensif dengan ajudan dan Sekretaris Pimpinan Daerah serta OPD terkait agar tidak terjadi tumpang tindih acara dan memaksimalkan petugas Protokoler yang ada

3.5 Laporan Realisasi Anggaran

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<i>BELANJA TIDAK LANGSUNG</i>	<i>26.894.223.388,00</i>	<i>24.884.963.436,00</i>	<i>2.009.259.952,00</i>	<i>92,53</i>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.894.223.388,00	24.884.963.436,00	2.009.259.952,00	92,53
<i>BELANJA LANGSUNG</i>	<i>41.541.608.299,00</i>	<i>33.442.290.012,00</i>	<i>8.099.318.287,00</i>	<i>80,50</i>
<i>Program Pelayanan Kesekretariatan</i>	<i>12.645.660.184,00</i>	<i>9.928.751.611,00</i>	<i>2.716.908.573,00</i>	<i>78,52</i>

Penyediaan barang/jasa perkantoran	6.872.106.860,00	5.298.532.185,00	1.573.574.675,00	77,10
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	757.938.980,00	674.762.568,00	83.176.412,00	89,03
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	6.585.000,00	2.262.300,00	4.322.700,00	34,36
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	3.588.714.000,00	2.807.164.004,00	781.549.996,00	78,22
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1.389.510.660,00	1.125.271.154,00	264.239.506,00	80,98
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	24.285.000,00	15.926.100,00	8.358.900,00	65,58
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	727.500,00	727.500,00	0	100
Penyusunan laporan keuangan	5.792.184,00	4.105.800,00	1.686.384,00	70,89
<i>Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik</i>	776.852.080,00	689.612.501,00	87.239.579,00	88,77
Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah	591.345.000,00	532.757.500,00	58.587.500,00	90,09

Monev Kelembagaan, Anjab, dan Reformasi Birokrasi	148.825.000,00	127.666.621,00	21.158.379,00	85,78
Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah	36.682.080,00	29.188.380,00	7.493.700,00	79,57
<i>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum</i>	<i>1.126.938.660,00</i>	<i>883.322.550,00</i>	<i>243.616.110,00</i>	<i>78,38</i>
Perencanaan dan pembahasan produk hukum daerah	395.210.000,00	304.099.650,00	91.110.350,00	76,95
Penyusunan jawaban eksekutif	11.584.800,00	9.400.000,00	2.184.800,00	81,14
Pengelolaan kajian dan dokumentasi hukum	250.453.860,00	187.811.900,00	62.641.960,00	74,99
Fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum, pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum	469.690.000,00	382.011.000,00	87.679.000,00	81,33
<i>Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan</i>	<i>1.268.766.145,00</i>	<i>1.248.906.996,00</i>	<i>19.859.149,00</i>	<i>98,43</i>
Fasilitasi penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.	398.949.000,00	396.229.072,00	2.719.928,00	99,32

Fasilitasi Penyusunan Ukuran Kinerja Daerah	413.252.900,00	403.422.400,00	9.830.500,00	97,62
Pengendalian Kegiatan Pembangunan daerah	143.234.200,00	136.726.084,00	6.508.116,00	95,46
Penyusunan Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Berkala)	313.330.045,00	312.529.440,00	800.605,00	99,74
<i>Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</i>	<i>9.776.601.570,00</i>	<i>7.934.210.359,00</i>	<i>1.842.391.211,00</i>	<i>81,16</i>
Pembinaan dan bantuan sarana keagamaan	5.625.080.580,00	4.601.667.459,00	1.023.413.121,00	81,81
Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev bidang kesejahteraan sosial	1.051.139.740,00	354.925.300,00	696.214.440,00	33,77
Koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan monev agama dan kemasyarakatan	3.100.381.250,00	2.977.617.600,00	122.763.650,00	96,04
<i>Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	<i>1.972.143.386,00</i>	<i>1.825.756.271,00</i>	<i>146.387.115,00</i>	<i>92,58</i>
Penyiapan rumusan bahan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta	132.010.965,00	123.483.315,00	8.527.650,00	93,54

pelayanan kedinasan Kepala Daerah				
Penguatan kapasitas dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan	999.438.501,00	947.090.258,00	52.348.243,00	94,76
Fasilitasi pelaksanaan Rupabumi	248.470.000,00	241.570.473,00	6.899.527,00	97,22
Fasilitasi penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan	238.171.500,00	227.646.818,00	10.524.682,00	95,58
Fasilitasi kerjasama	354.052.420,00	285.965.407,00	68.087.013,00	80,07
<i>Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD</i>	<i>866.647.090,00</i>	<i>701.798.857,00</i>	<i>164.848.233,00</i>	<i>80,98</i>
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	40.073.850,00	25.248.350,00	14.825.500,00	63,00
Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	65.900.000,00	55.551.000,00	10.349.000,00	84,30
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Alam,	49.850.000,00	30.785.500,00	19.064.500,00	61,76

Pangan dan Pertanian serta Perikanan				
Koordinasi penyiapan rumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	362.423.240,00	282.169.041,00	80.254.199,00	77,86
Monitoring dan evaluasi kebijakan Bidang Penanaman Modal dan BUMD	128.400.000,00	120.892.500,00	7.507.500,00	94,15
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	216.500.000,00	184.247.466,00	32.252.534,00	85,10
Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dg Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yg diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah	3.500.000,00	2.905.000,00	595.000,00	83,00

<i>Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>2.575.185.304,00</i>	<i>2.129.806.091,00</i>	<i>445.379.213,00</i>	<i>82,70</i>
Fasilitasi dan pengelolaan LPSE	890.963.124,00	774.059.543,00	116.903.581,00	86,88
Fasilitasi pengadaan barang dan jasa melalui bagian PBJ	455.691.940,00	416.563.163,00	39.128.777,00	91,41
Pelaksanaan advokasi bidang pengadaan barang dan jasa	441.327.840,00	294.548.744,00	146.779.096,00	66,74
Pembinaan pengadaan barang dan jasa	787.202.400,00	644.634.641,00	142.567.759,00	81,89
<i>Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.</i>	<i>10.532.813.880,00</i>	<i>8.100.124.776,00</i>	<i>2.432.689.104,00</i>	<i>76,90</i>
Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati Dan Sekretaris Daerah	3.884.185.400,00	2.897.508.632,00	986.676.768,00	74,60
Penyediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan	6.648.628.480,00	5.202.616.144,00	1.446.012.336,00	78,25

Tabel 3.59 Laporan Realisasi Anggaran

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya peran kebijakan	1. Presentase implementasi	100%	100%	100%	1.126.938.660	883.322.550	78,38 %

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.	produk hukum daerah						
	2. Presentase implementasi kebijakan daerah untuk:						
	a. Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	1.972.143.386	1.825.756.271	92,58%
	b. Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	9.776.601.570	7.934.210.359	81,16 %
	c. Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	866.647.090	701.798.857	80,98 %
	d. Bidang Pembangunan	100%	100%	100%	1.268.766.145	1.248.906.996	98,43 %
	e. Bidang Pengadaan Barang / Jasa	100%	100%	100%	2.575.185.304	2.129.806.091	82,70%
	f. Bidang Organisasi	100%	100%	100%	776.852.080	689.612.501	88,77%
	3. Persentase IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target	100%	63,64%	63,64%	143.234.200	136.726.084	95,46 %
	4. Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal kategori baik	100%	100%	100%	591.345.000	532.757.500	94,02 %
5. Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah	75	86,94	115,98%	12.645.660.184	9.928.751.611	78,52	
6. Nilai SKM pelayanan	75	85	113,3%	10.532.813.880	8.100.124.776	76,90	

kepada pimpinan daerah						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.60 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efektivitas dan Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
Meningkatnya peran kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo	➤ Presentase implementasi produk hukum daerah	100%	78,38 %	21,62%
	➤ Presentase implementasi kebijakan daerah untuk:			
	a. Bidang Pemerintahan	100%	92,58%	7,42%
	b. Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	81,16%	18,84%
	c. Bidang Perekonomian	100%	80,98 %	19,02 %
	d. Bidang Pembangunan	100%	98,43%	1,57%
	e. Bidang Pengadaan Barang / Jasa	100%	82,70%	17,30%
f. Bidang	100%	88,77%	11,23%	

	Organisasi			
	➤ Persentase IKU (Indikator Kinerja Utama) OPD yang mencapai target	63,64%	95,46%	-31,82%
	➤ Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal kategori baik	100%	90,09 %	9,91%
	➤ Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah	115,98%	78,52%	37,46%
	➤ Nilai SKM pelayanan kepada pimpinan daerah	100%	76,90 %	23,10 %

Tabel 3.61 Efektifitas dan Efisiensi

Catatan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja -- % Penyerapan Anggaran

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

➤ **INDIKATOR SASARAN** : Presentase implementasi produk hukum daerah
 Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk indicator prosentase implemetasi produk hukum dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 100%, dan penyerapan anggaran sebesar 78,38 % sehingga diperoleh efisiensi sebesar 21,62%. Efisiensi tersebut disebabkan antara lain pemberian honorarium kepada Tim pembentukan Produk Hukum diberikan sesuai kehadiran dan partisipasi/ kontribusi terhadap pembahasan produk hukum dimaksud.

➤ **INDIKATOR SASARAN** : Presentase implementasi kebijakan daerah untuk Bidang Pemerintahan.

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 8 indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan

penyerapan anggaran sebesar 92,58% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 7,42%. Efisiensi dimaksud disebabkan antara lain adalah pembatasan kegiatan terkait COVID-19 sehingga anggaran yang bersifat penyediaan tidak terserap maksimal.

- **INDIKATOR SASARAN** : Presentase implementasi kebijakan daerah untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 3 kegiatan kinerja yang efektif tercapai 100% yang efisien dalam penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran 81,16% dan efisiensi sebesar 18,84%.

- **INDIKATOR SASARAN** : Presentase implementasi kebijakan daerah untuk Bidang Perekonomian dan SDA

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 5 indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan 2 indikator kinerja yang efektif tercapai lebih dari 100%, dan 1 indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran. Dengan penyerapan anggaran sebesar 80,98% dan efisiensi sebesar 19,02%.

Efisiensi tersebut terdapat pada kegiatan "Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu / tidak berpita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran" yang semula terdapat anggaran Rp 10.000.000,00 kemudian dialokasikan pada kegiatan "Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisialisasi oleh Pemerintah Daerah" dengan anggaran Rp 3.500.000,00. Terdapat penurunan anggaran sebesar 35%, penurunan ini merupakan efisiensi anggaran karena pada kegiatan Operasi Bersama tersebut Bagian Perekonomian dan SDA bekerja sama dengan KPPBC TMP B Sidoarjo.

- **INDIKATOR SASARAN** :Presentase Implementasi kebijakan daerah Bidang Pembangunan

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja tersebut efektif tercapai 100%, dengan penyerapan anggaran sebesar 98,43% dan efisiensi sebesar 1,57%.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh sisa lebih dalam belanja operasional kantor.

- **INDIKATOR SASARAN** : IKU OPD yang mencapai target

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja tersebut belum efektif tercapai 100%, sehingga tidak bisa dikatakan efisien.

- **INDIKATOR SASARAN : Presentase Implementasi kebijakan daerah Bidang PBJ**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang efektif tercapai 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh pencapaian target kinerja yang maksimal yaitu 100% sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar 82,70% dengan efisiensi 17,3%.

- **INDIKATOR SASARAN : Presentase implementasi kebijakan daerah bidang organisasi**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja pada bagian Organisasi sangat efektif tercapai 100%, dan indikator kinerja juga mengalami efisien dalam penggunaan anggaran. Dengan penyerapan anggaran sebesar 90,09% dan efisiensi sebesar 9,91%.

Efisiensi tersebut disebabkan oleh ditambahkan dua SDM, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan sendiri yang semula rencana dikerjakan oleh konsultan.

- **INDIKATOR SASARAN : Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal kategori baik**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja pada bagian Organisasi sangat efektif tercapai 100%, dan indikator kinerja juga mengalami efisien dalam penggunaan anggaran. Dari semua atau 49 OPD, hasil rata-rata SKM mendapat nilai 89,016 atau kategori A (Sangat Baik) sedangkan 18 OPD nilainya B (Baik).

Efisiensi tersebut disebabkan oleh ditambahkan dua SDM, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan sendiri yang semula rencana dikerjakan oleh konsultan.

- **INDIKATOR SASARAN : Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang sangat efektif tercapai 115,96%

Efisiensi tersebut disebabkan oleh pencapaian target kinerja yang melebihi target yaitu 115,96% sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar 78,52%.

➤ **INDIKATOR SASARAN : Nilai SKM pelayanan pimpinan daerah**

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang efektif tercapai 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut disebabkan oleh anggaran tersebut bersifat persediaan (sesuai dengan permintaan dan disposisi pimpinan).

Bahwasannya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Keprotokolan, Informasi Kehumasan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah & Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan Telah Berhasil. Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kegiatan dan Jadwal Yang Telah di Tetukan. Hal ini tidak lepas dari Koordinasi, Kerjasama dan Komunikasi yang Baik, Penyerapan Anggaran yang Terserap 76.90% dari Target dan Efisiensinya 23.1%.

BAB IV

PENUTUP / SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun 2020. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari 1 Sasaran terbagi menjadi 6 indikator yaitu :

1. Persentase implementasi produk hukum daerah.
2. Persentase implementasi kebijakan daerah pada :
 - Bidang pemerintahan
 - Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Bidang Perekonomian
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Pengadaan Barang / Jasa
 - Bidang Organisasi
3. Persentase IKU OPD yang mencapai target
4. Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal kategori baik
5. Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah
6. Nilai SKM pelayanan pimpinan daerah

Pada indikator sasaran 1 dipangku oleh program Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum , untuk sasaran 2 dipangku oleh Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, Penanaman Modal dan BUMD, Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik, untuk sasaran 3 dipangku oleh Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan , untuk sasaran 4 dipangku oleh Program Perumusan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik, untuk sasaran 5 dipangku oleh Program Pelayanan Kesekretariatan

serta untuk sasaran 6 dipangku oleh Program kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.

Dari keenam sasaran tersebut ada 2 sasaran yang masuk dalam kategori sangat baik yakni :

1. Nilai SKM pelayanan Sekretariat Daerah
2. Nilai SKM pelayanan pimpinan daerah

Sedangkan ada 3 sasaran yang masuk pada kategori baik yakni

1. Persentase implementasi produk hukum daerah.
2. Persentase implementasi kebijakan daerah pada :
 - Bidang pemerintahan
 - Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Bidang Perekonomian
 - Bidang Pembangunan
 - Bidang Pengadaan Barang / Jasa
 - Bidang Organisasi

3. Persentase OPD pelayanan publik dengan nilai SKM minimal kategori baik

Dan ada 1 sasaran yang masuk pada kategori kurang yakni Persentase IKU OPD yang mencapai target. Hal ini dikarenakan berdasarkan angka, data, capaian dan pendukung yang telah dihimpun dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum memenuhi target, atau sekitar 28,28% dari 99 IKD yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja, maka telah diupayakan dengan menyusun peraturan tentang Penilaian Kinerja OPD, yang didalamnya terdapat komposisi penilaian atas capaian kinerja OPD.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, secara umum bahwa target yang telah ditetapkan telah dapat tercapai, meskipun terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini dibuat sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam satu tahun anggaran.